



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan laporan keuangan *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil* Kabupaten Grobogan An Audited Tahun Anggaran 2020 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
Laporan keuangan merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah daerah atas penggunaan keuangan daerah dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan operasional pemerintahan, hal tersebut menjadi tolok ukur kinerja pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pada setiap akhir tahun anggaran. Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Dengan telah keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, dan telah ditetapkannya Peraturan



Bupati Grobogan Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 47 Tahun 2016 tentang tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Grobogan Berbasis Akrua, maka tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, hasil operasi, dan perubahan ekuitas Pemerintah Kabupaten Grobogan yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas atas sumber daya yang dipercayakannya. Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan.

Melalui Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan, para pengguna laporan diharapkan dapat memperoleh informasi untuk menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan memuat informasi mengenai:

- 1) Penjelasan atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran;
- 2) Laporan Operasional (LO);
- 3) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
- 4) Neraca.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan Tahun 2020 disusun berdasarkan:



1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Nomor 124 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan
15. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
17. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 32 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Grobogan;



18. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Grobogan Berbasis Akrua;l;
19. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
- 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD

Bab II Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD

- 2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
- 2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab III Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD

Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah daerah

- 3.1 Laporan Realisasi Anggaran
 - 3.1.1 Pendapatan
 - 3.1.2 Belanja
- 3.2 Laporan Operasional
- 3.3 Laporan Perubahan Ekuitas
- 3.4 Neraca



Bab IV Penjelasan atas informasi non keuangan
pemerintah daerah

Bab V Penutup.



BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

A. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2020

Realisasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2020 secara ringkas adalah sebagai berikut:

1. Realisasi Pendapatan sebesar Rp0,00 jika dibandingkan dengan anggarannya yaitu sebesar Rp0,00 atau tercapai 0,00 persen.
2. Realisasi Belanja dan Transfer sebesar Rp10.119.883.831,00 lebih rendah Rp573.071.153,00 jika dibandingkan dengan anggaran yaitu sebesar Rp10.692.954.984,00 atau tercapai 94,64 persen.
3. Pada realisasi APBD tahun anggaran 2020 terjadi defisit sebesar Rp10.119.883.831,00. Sedangkan pada pembiayaan terdapat Pembiayaan Netto sebesar Rp0,00 dengan demikian maka terdapat Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SIkPA) sebesar Rp10.119.883.831,00. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

	APBD Tahun 2020		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Surplus Penerimaan/Sisa Pengeluaran
1 Pendapatan dan Belanja			
Pendapatan	-	-	-
Belanja dan Transfer	10.692.954.984,00	10.119.883.831,00	573.071.153,00
Surplus/(Defisit)	(10.692.954.984,00)	(10.119.883.831,00)	573.071.153,00
2 Pembiayaan			
Penerimaan Pembiayaan	-	-	-
Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-
Pembiayaan Netto	-	-	-
Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran	(10.692.954.984,00)	(10.119.883.831,00)	573.071.153,00



Dengan menggunakan anggaran sebagai tolok ukur kinerja, SIKPA TA 2020 berasal dari *over target* pendapatan sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen; realisasi Belanja sebesar Rp10.119.883.831,00 atau 94,64 persen; dan dari surplus Pembiayaan Netto sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen.

B. Realisasi Anggaran Tahun 2020 dibandingkan dengan Tahun 2019.

Belanja TA 2020 menurun sebesar Rp3.133.089.663,00 atau 23,64 persen jika dibandingkan Belanja TA. 2019. Pembiayaan Netto Rp0,00 atau 0,00 persen sedangkan SIKPA menurun Rp3.133.089.663,00 atau 76,36 persen dibandingkan dengan Tahun 2020.

2.2 Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Belanja TA 2020 terealisasi sebesar 94,64 persen dibandingkan dengan anggarannya, sedangkan realisasi belanja pada TA 2019 sebesar 94,88 persen. Hambatan dan kendala dalam pencapaian target belanja TA 2020 adalah terjadi pandemi COVID 19 sehingga terdapat pengurangan belanja/revocusing dalam penanganan COVID 19 sehingga banyak belanja modal pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan yang direvocusing.



BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, bahwa laporan keuangan pemerintah daerah menyajikan informasi tentang:

- A. Realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.
- B. Laporan operasional, yaitu laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional.
- C. Laporan perubahan ekuitas, yaitu laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi, dan ekuitas akhir.
- D. Neraca, yaitu laporan yang menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

3.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas akun pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Realisasi Pendapatan pada Tahun Anggaran (TA) 2020 adalah sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00 persen dari target APBD Perubahan TA. 2020 sebesar Rp0,00. Sesuai dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan tidak memungut denda atas keterlambatan pencatatan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan.

Realisasi Belanja Daerah dan Transfer pada TA.2020 adalah sebesar Rp10.119.883.831,00 atau 94,64 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan TA.2020 sebesar Rp10.692.954.984,00. Realisasi Belanja Daerah TA.2020 mengalami penurunan Rp3.133.089.663,00 atau 23,64 persen jika dibandingkan



dengan TA.2019. Realisasi Belanja Daerah TA.2020 terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp9.428.262.783,00; Belanja Modal sebesar Rp691.621.048,00; Belanja Tidak Terduga sebesar Rp0,00 dan Transfer sebesar Rp0,00. Berdasarkan realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp0,00 dan realisasi Belanja Daerah dan Transfer sebesar Rp10.119.883.831,00; maka terjadi Defisit Anggaran pada TA.2020 sebesar (Rp10.119.883.831,00). Sementara itu, realisasi Pembiayaan (Netto) pada TA.2020 adalah sebesar Rp0,00 yang berasal dari Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp0,00 dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp 0,00. Terjadinya Defisit Anggaran dan realisasi Pembiayaan Netto mengakibatkan Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) TA.2020 sebesar (Rp10.119.883.831,00).

Untuk lebih jelasnya perbandingan antara anggaran dan realisasinya selama TA. 2020 dan realisasi TA. 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut:

URAIAN	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendapatan			
Pendapatan Asli Daerah	-	-	-
Pendapatan Transfer	-	-	-
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	-	-	-
Jumlah Pendapatan	-	-	-
Belanja			
Belanja Oprasi	9.952.339.984,00	9.428.262.783,00	11.274.428.802,00
Belanja Modal	740.615.000,00	691.621.048,00	1.978.544.692,00
Belanja Tidak Terduga	-	-	-
Transfer	-	-	-
Jumlah Belanja	10.692.954.984,00	10.119.883.831,00	13.252.973.494,00
Surplus/(Defisit)	(10.692.954.984,00)	(10.119.883.831,00)	(13.252.973.494,00)
Pembiayaan			
Penerimaan Pembiayaan	-	-	-
Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-
Pembiayaan Neto	-	-	-
Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran	(10.692.954.984,00)	(10.119.883.831,00)	(13.252.973.494,00)

Uraian selengkapnya dari masing-masing akun laporan realisasi anggaran adalah sebagai berikut:

3.1.1 PENDAPATAN-LRARp0,00

Pendapatan-LRA, adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode



tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Realisasi Pendapatan-LRA pada Tahun Anggaran (TA) 2020 adalah sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00 persen dari target APBD Perubahan TA 2020 sebesar Rp0,00. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan Tahun 2020 tidak mengelola pendapatan.

3.1.2 BELANJA – (LRA)Rp10.119.883.831,00

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening bendahara pengeluaran/kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Realisasi Belanja pada TA 2020 adalah sebesar Rp10.119.883.831,00 yang berarti mencapai 94,64 persen dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp10.692.954.984,00. Berdasarkan jenisnya, Belanja terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Transfer. Perbandingan antara anggaran dan realisasi Belanja TA 2020 serta realisasi TA 2019 adalah sebagai berikut:

No.	Belanja	2020		2019
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Belanja Operasi	9.952.339.984,00	9.428.262.783,00	11.274.428.802,00
2	Belanja Modal	740.615.000,00	691.621.048,00	1.978.544.692,00
3	Belanja Tidak Terduga	-	-	-
4	Transfer	-	-	-
Jumlah Belanja		10.692.954.984,00	10.119.883.831,00	13.252.973.494,00

1. BELANJA OPERASI.....Rp9.428.262.783,00

Belanja Operasi meliputi pengeluaran untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek.

Realisasi Belanja Operasi TA 2020 adalah sebesar Rp9.428.262.783,00 yang berarti mencapai 94,73 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp9.952.339.984,00. Belanja Operasi terdiri atas Belanja Pegawai,



Belanja Barang, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Belanja Operasi:	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Pegawai	2.977.065.984,00	2.870.310.616,00	3.094.665.941,00
Belanja Barang	6.975.274.000,00	6.557.952.167,00	8.179.762.861,00
Belanja Bunga	-	-	-
Belanja Subsidi	-	-	-
Belanja Hibah	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-
Jumlah Belanja Operasi	9.952.339.984,00	9.428.262.783,00	11.274.428.802,00

A. Belanja Pegawai.....Rp2.870.310.616,00

Realisasi Belanja Pegawai TA 2020 adalah sebesar Rp2.870.310.616,00 yang berarti mencapai 96,41 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp2.977.065.984,00. Hal ini berarti Belanja Pegawai lebih kecil Rp224.355.325,00 atau 7,25 persen dari realisasi TA 2019. Belanja pegawai meliputi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

No.	Belanja Pegawai:	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
1	Gaji dan Tunjangan Pegawai	2.977.065.984,00	2.870.310.616,00	96,41	(106.755.368,00)
	Gaji PNS	2.977.065.984,00	2.870.310.616,00	96,41	(106.755.368,00)
	Jumlah Belanja Pegawai	2.977.065.984,00	2.870.310.616,00	96,41	(106.755.368,00)

Belanja Gaji dan Tunjangan PNS. Realisasi Gaji dan Tunjangan PNS sebesar Rp2.870.310.616,00 atau 94,61 persen dari anggarannya sebesar Rp2.977.065.984,00. Terdiri dari :



Pemerintah Kabupaten Grobogan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

No.	Gaji dan Tunjangan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.241.719.681,00	2.177.223.940,00	97,12	(64.495.741,00)
2	Tunjangan Keluarga	217.437.295,00	216.827.444,00	99,72	(609.851,00)
3	Tunjangan Jabatan	185.945.000,00	183.800.000,00	98,85	(2.145.000,00)
4	Tunjangan Fungsional	-	-	-	-
5	Tunjangan Fungsional Umum	66.685.000,00	65.390.000,00	98,06	(1.295.000,00)
6	Tunjangan Beras	136.077.180,00	117.392.820,00	86,27	(18.684.360,00)
7	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.181.583,00	980.531,00	82,98	(201.052,00)
8	Pembulatan Gaji	33.542,00	30.845,00	91,96	(2.697,00)
9	Iuran Jaminan Kesehatan	106.789.368,00	90.740.439,00	84,97	(16.048.929,00)
20	Asuransi Ketenagakerjaan	21.197.335,00	17.924.597,00	84,56	(3.272.738,00)
	Jumlah Gaji dan Tunjangan	2.977.065.984,00	2.870.310.616,00	96,41	(106.755.368,00)

B. Belanja BarangRp6.557.952.167,00

Realisasi Belanja Barang TA 2020 adalah sebesar Rp6.557.952.167,00 yang berarti mencapai 94,02 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp6.975.274.000,00. Belanja barang terdiri atas belanja sebagai berikut:

No.	Belanja Barang	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
1	Belanja Bahan Pakai Habis	3.254.076.000,00	3.074.904.612,00	94,49	(179.171.388,00)
2	Belanja Bahan/Material	6.400.000,00	6.400.000,00	100,00	-
3	Belanja Jasa Kantor	521.820.000,00	516.120.311,00	98,91	(5.699.689,00)
4	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	21.930.000,00	21.053.700,00	96,00	(876.300,00)
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	543.215.000,00	502.420.500,00	92,49	(40.794.500,00)
6	Belanja Makanan dan Minuman	302.660.000,00	247.270.000,00	81,70	(55.390.000,00)
7	Belanja Pakaian Kerja	-	-	-	-
8	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	40.194.000,00	36.300.000,00	90,31	(3.894.000,00)
9	Belanja Perjalanan Dinas	338.885.000,00	321.779.044,00	94,95	(17.105.956,00)
10	Belanja Pemeliharaan	108.019.000,00	103.144.000,00	95,49	(4.875.000,00)
11	Belanja Jasa Konsultasi	48.190.000,00	46.280.000,00	96,04	(1.910.000,00)
12	Belanja Honorarium Non Pegawai	8.930.000,00	8.930.000,00	100,00	-
13	Belanja Honorarium PNS	616.280.000,00	569.670.000,00	92,44	(46.610.000,00)
14	Belanja Honorarium Non PNS	1.164.675.000,00	1.103.680.000,00	94,76	(60.995.000,00)
	Jumlah Belanja Barang	6.975.274.000,00	6.557.952.167,00	94,02	(417.321.833,00)

1. Realisasi Belanja Bahan Pakai Habis sebesar Rp3.074.904.612,00,00 atau 94,49 persen dari anggarannya sebesar Rp3.254.076.000,00. Rincian selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:



Pemerintah Kabupaten Grobogan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

No.	Belanja Bahan Pakai Habis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
1	Belanja Alat Tulis Kantor	3.106.030.000,00	2.940.016.612,00	94,66	(166.013.388,00)
2	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	6.005.000,00	5.881.000,00	97,94	(124.000,00)
3	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya	5.880.000,00	5.880.000,00	100,00	-
4	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	15.005.000,00	14.281.000,00	95,17	(724.000,00)
5	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	2.910.000,00	2.586.000,00	88,87	(324.000,00)
6	Belanja Bahan Medis Pakai Habis	118.246.000,00	106.260.000,00	89,86	(11.986.000,00)

2. Realisasi Belanja Bahan/Material sebesar Rp6.400.000,00 atau 100 persen dari anggarannya sebesar Rp6.400.000,00. Rincian selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

No.	Belanja Bahan/Material	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
1	Belanja Bahan Kimia	-	-	-	-
2	Belanja Perlengkapan Pelatihan	6.400.000,00	6.400.000,00	100,00	-
Jumlah Belanja Bahan/Material		6.400.000,00	6.400.000,00	100,00	-

3. Realisasi Belanja Jasa Kantor sebesar Rp516.120.311,00 atau 98,91 persen dari anggarannya sebesar Rp521.820.000,00. Rincian selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

No.	Belanja Jasa Kantor	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
1	Belanja Telepon	2.500.000,00	1.512.801,00	60,51	(987.199,00)
2	Belanja Air	6.700.000,00	5.947.600,00	88,77	(752.400,00)
3	Belanja Listrik	149.000.000,00	148.402.772,00	99,60	(597.228,00)
4	Belanja Surat Kabar/Majalah	8.960.000,00	8.060.000,00	89,96	(900.000,00)
5	Belanja Kawat/Faximil/Internet	73.400.000,00	72.248.138,00	98,43	(1.151.862,00)
6	Belanja Paket/Pengiriman	2.500.000,00	2.449.000,00	97,96	(51.000,00)
7	Belanja Jasa Dekorasi	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	-
8	Belanja Jasa Siaran Radio	112.500.000,00	112.500.000,00	100,00	-
9	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	155.760.000,00	155.100.000,00	99,58	(660.000,00)
10	Belanja Jasa Tenaga/Tukang	3.000.000,00	2.400.000,00	80,00	(600.000,00)
Jumlah Belanja Jasa Kantor		521.820.000,00	516.120.311,00	98,91	(5.699.689,00)



4. Realisasi Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor sebesar Rp21.053.700,00 atau 96,00 persen dari anggarannya sebesar Rp21.930.000,00. Rincian selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

No.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
1	Belanja Jasa Service	3.000.000,00	2.980.000,00	99,33	(20.000,00)
2	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.305.000,00	8.305.000,00	100,00	-
3	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	3.500.000,00	3.484.000,00	99,54	(16.000,00)
4	Belanja Jasa KIR	301.000,00	102.500,00	34,05	(198.500,00)
5	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	6.824.000,00	6.182.200,00	90,59	(641.800,00)
Jumlah Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor		21.930.000,00	21.053.700,00	96,00	(876.300,00)

5. Realisasi Belanja Cetak dan Penggandaan sebesar Rp502.420.500,00 atau 92,49 persen dari anggarannya sebesar Rp543.215.000,00. Rincian selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

No.	Belanja Cetak dan Penggandaan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
1	Belanja Cetak	418.605.000,00	384.392.500,00	91,83	(34.212.500,00)
2	Belanja Penggandaan	25.652.000,00	22.054.000,00	85,97	(3.598.000,00)
3	Belanja Spanduk	23.902.000,00	23.120.000,00	96,73	(782.000,00)
4	Belanja Penjilidan	75.056.000,00	72.854.000,00	97,07	(2.202.000,00)
Jumlah Belanja Cetak dan Penggandaan		543.215.000,00	502.420.500,00	92,49	(40.794.500,00)

6. Realisasi Belanja Makanan dan Minuman sebesar Rp247.270.000,00 atau 81,70 persen dari anggarannya sebesar Rp302.660.000,00. Rincian selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:



Pemerintah Kabupaten Grobogan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

No.	Belanja Makanan dan Minuman	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
1	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	209.700.000,00	164.045.000,00	78,23	(45.655.000,00)
2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	36.660.000,00	32.970.000,00	89,93	(3.690.000,00)
3	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	41.900.000,00	35.855.000,00	85,57	(6.045.000,00)
4	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	14.400.000,00	14.400.000,00	100,00	-
Jumlah Belanja Makanan dan Minuman		302.660.000,00	247.270.000,00	81,70	(55.390.000,00)

7. Realisasi Belanja Pakaian Kerja sebesar Rp0,00 atau 0 persen dari anggarannya sebesar Rp0,00. Rincian selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

No.	Belanja Pakaian Kerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
1	Belanja Pengadaan Pakaian SATPAM dan Pembersih	-	-	-	-
Jumlah Belanja Pakaian Kerja		-	-	-	-

8. Realisasi Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu sebesar Rp36.300.000,00 atau 90,31 persen dari anggarannya sebesar Rp40.194.000,00. Rincian selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

No.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
1	Belanja Pakaian Batik Tradisional	-	-	-	-
2	Belanja Pakaian Olahraga	40.194.000,00	36.300.000,00	90,31	(3.894.000,00)
Jumlah Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu		40.194.000,00	36.300.000,00	90,31	(3.894.000,00)

9. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp321.779.044,00 atau 94,95 persen dari anggarannya sebesar Rp338.885.000,00. Rincian selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

No.	Belanja Perjalanan Dinas	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	210.000.000,00	193.010.729,00	91,91	(16.989.271,00)
2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	128.885.000,00	128.768.315,00	99,91	(116.685,00)
Jumlah Belanja Perjalanan Dinas		338.885.000,00	321.779.044,00	94,95	(17.105.956,00)



10. Realisasi Belanja Pemeliharaan sebesar Rp103.144.000,00 atau 95,49 persen dari anggarannya sebesar Rp108.019.000,00. Rincian selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

No.	Belanja Pemeliharaan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
1	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	96.019.000,00	91.342.000,00	95,13	(4.677.000,00)
2	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	12.000.000,00	11.802.000,00	98,35	(198.000,00)
Jumlah Belanja Pemeliharaan		108.019.000,00	103.144.000,00	95,49	(4.875.000,00)

11. Realisasi Belanja Jasa Konsultasi sebesar Rp46.280.000,00 atau 96,04 persen dari anggarannya sebesar Rp48.190.000,00. Rincian selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

No.	Belanja Jasa Konsultasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
1	Belanja Jasa Konsultasi Penelitian	-	-	-	-
2	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	48.190.000,00	46.280.000,00	96,04	(1.910.000,00)
Jumlah Belanja Jasa konsultasi		48.190.000,00	46.280.000,00	96,04	(1.910.000,00)

12. Realisasi Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketigasebesar Rp0,00 atau 0 persen dari anggarannya sebesar Rp0,00. Rincian selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

No.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
1	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	-	-	-	-
Jumlah Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga		-	-	-	-



13. Realisasi Belanja Honorarium Non Pegawai sebesar Rp8.930.000,00 atau 100 persen dari anggarannya sebesar Rp8.930.000,00. Rincian selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

No.	Belanja Honorarium Non Pegawai	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
1	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	8.930.000,00	8.930.000,00	100,00	-
Jumlah Belanja Honorarium Non Pegawai		8.930.000,00	8.930.000,00	100,00	-

14. Realisasi Belanja Honorarium PNS sebesar Rp569.670.000,00 atau 92,44 persen dari anggarannya sebesar Rp616.280.000,00. Rincian selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

No.	Belanja Honorarium PNS	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
1	Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan	592.800.000,00	548.000.000,00	92,44	(44.800.000,00)
2	Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa	9.145.000,00	8.560.000,00	93,60	(585.000,00)
3	Belanja Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	6.835.000,00	6.360.000,00	93,05	(475.000,00)
4	Belanja Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	7.500.000,00	6.750.000,00	90,00	(750.000,00)
Jumlah Belanja Honorarium PNS		616.280.000,00	569.670.000,00	92,44	(46.610.000,00)

15. Realisasi Belanja Honorarium Non PNS sebesar Rp1.103.680.000,00 atau 94,76 persen dari anggarannya sebesar Rp1.164.675.000,00. Rincian selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

No.	Belanja Honorarium Non PNS	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
1	Belanja Honorarium Tenaga Lain-lain	1.092.300.000,00	1.038.180.000,00	95,05	(54.120.000,00)
2	Belanja Honorarium Tenaga Tidak Tetap	72.375.000,00	65.500.000,00	90,50	(6.875.000,00)
Jumlah Belanja Honorarium Non PNS		1.164.675.000,00	1.103.680.000,00	94,76	(60.995.000,00)

2. BELANJA MODAL.....Rp691.621.048,00

Belanja modal mencakup pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi pengeluaran atas



perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya. Realisasi Belanja Modal TA 2020 adalah sebesar Rp691.621.048,00 atau 93,38 persen dari anggarannya sebesar Rp740.615.000,00. Realisasi belanja modal terdiri dari:

No.	Belanja Modal	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang)
1	Belanja Modal Tanah	-	-	-	-
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	740.615.000,00	691.621.048,00	93,38	(48.993.952,00)
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
Jumlah Belanja Modal		740.615.000,00	691.621.048,00	93,38	(48.993.952,00)

- 1) Realisasi Belanja Modal Tanah sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen dari anggarannya sebesar Rp0,00.
- 2) Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp691.621.048,00 atau 93,38 persen dari anggarannya sebesar Rp740.615.000,00. Rincian selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

No	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Lebih/ (Kurang)
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	0,00	0,00%	0,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00%	0,00
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	740.615.000,00	691.621.048,00	93,38%	(48.993.952,00)
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin		740.615.000,00	691.621.048,00	93,38%	(48.993.952,00)

- 3) Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp0,00 atau 0 persen dari anggarannya sebesar Rp0,00.
- 4) Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp0,00 atau 0 persen dari anggarannya sebesar Rp0,00. Rincian selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

Penganggaran Belanja Modal mengikuti kebijakan akuntansi mengenai nilai minimum kapitalisasi aset tetap. Nilai minimum kapitalisasi aset tetap adalah batasan besaran minimum belanja per unit barang untuk dianggarkan sebagai Belanja Modal. Pembelian barang yang tidak memenuhi nilai minimum kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam Belanja Barang. Pada



tahun anggaran 2020 belanja yang menghasilkan aset tidak hanya berasal dari belanja modal saja, tetapi juga kapitalisasi dari belanja barang dan jasa sebesar Rp17.600.000,00. Sedangkan belanja yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebesar Rp0,00. Dihilangkan kepada masyarakat sebesar Rp0,00 dan belanja aset dengan nilai dibawah satuan minimal kapitalisasi aset tetap sebesar Rp0,00. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Uraian	Kapitalisasi dari Belanja Pegawai	Kapitalisasi dari Belanja Barang	Belanja Modal	Dihilangkan	Tidak Dikapitalisasi	Dibawah Nilai Kapitalisasi
Belanja Modal Tanah	-	-	-	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	17.600.000,00	-	-	-	-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	-	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	-	-
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-	-
Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	-	-	-
Jumlah	-	17.600.000,00	-	-	-	-

3. Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SIKPA).....(Rp10.119.883.831,00)

Berdasarkan Defisit Anggaran sebesar (Rp10.119.883.831,00) dan realisasi Pembiayaan Netto sebesar Rp0,00 sebagaimana diuraikan di atas, maka terdapat Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) TA 2020 sebesar (Rp10.119.883.831,00). Selanjutnya disajikan sebagaimana tabel berikut:



Pemerintah Kabupaten Grobogan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

No.	Uraian	Tahun 2020		Tahun 2019
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan dan Belanja			
	Pendapatan	-	-	-
	Belanja dan Transfer	10.692.954.984,00	10.119.883.831,00	13.252.973.494,00
	Surplus/(Defisit)	(10.692.954.984,00)	(10.119.883.831,00)	(13.252.973.494,00)
2	Pembiayaan			
	Penerimaan Pembiayaan	-	-	-
	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-
	Pembiayaan Neto	-	-	-
	Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran	(10.692.954.984,00)	(10.119.883.831,00)	(13.252.973.494,00)

Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) tahun 2020 sebesar (Rp10.119.883.831,00) tersebut berasal Dari anggaran Belanja dan Transfer sebesar Rp10.692.954.984,00 realisasinya sebesar Rp10.119.883.831,00.



3.4 NERACA

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi tentang posisi keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Penjelasan lebih lanjut tentang Laporan Keuangan Neraca Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan per 31 Desember 2020 dan 2019 (dalam Rupiah) adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Aset Lancar	2.712.824.687,40	2.738.583.344,00
Investasi Jangka Panjang	-	-
Aset Tetap	6.465.057.775,33	6.851.685.178,19
Dana Cadangan	-	-
Aset Lainnya	37.783.968,94	48.274.410,74
Jumlah Aset	9.215.666.431,67	9.638.542.932,93
Kewajiban Jangka Pendek	6.224.126,00	8.590.413,00
Kewajiban Jangka Panjang	-	-
Jumlah Kewajiban	6.224.126,00	8.590.413,00
Jumlah Ekuitas	9.209.442.305,67	9.629.952.519,93
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	9.215.666.431,67	9.638.542.932,93

Penjelasan dari masing-masing pos neraca diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. ASET.....Rp9.215.666.431,67

Nilai Aset Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan per 31 Desember 2019 sebesar Rp9.638.542.932,93 sedangkan nilai asset per 31 Desember 2020 sebesar Rp9.215.666.431,67 yang terdiri dari:

A. Aset LancarRp2.712.824.687,40

Aset lancar merupakan kelompok pos/rekening yang menggambarkan kekayaan daerah yang dapat dicairkan atau memiliki perputaran paling lama satu tahun terhitung sejak tanggal pelaporan neraca. Saldo keseluruhan kelompok akun aset lancar per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 dapat diperinci sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Grobogan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Aset Lancar	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1 Kas di Kas Daerah	-	-
2 Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
3 Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
4 Kas di BLUD	-	-
5 Kas di Bendahara FKTP	-	-
6 Kas di Bendahara Bos	-	-
7 Investasi Jangka Pendek	-	-
8 Piutang Pajak	-	-
9 Penyisihan Piutang Pajak	-	-
10 Piutang Retribusi	-	-
11 Penyisihan Piutang Retribusi	-	-
12 Piutang Lainnya	-	-
13 Penyisihan Piutang Lainnya	-	-
14 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
15 Penyisihan Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
16 Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-
17 Persediaan	2.712.824.687,40	2.738.583.344,00
Jumlah	2.712.824.687,40	2.738.583.344,00

1. Kas.....Rp0,00

Saldo kas pada Neraca terdiri atas Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan. Kas pada Neraca dapat diperincian sebagai berikut:

Kas	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
Kas di Kas Daerah	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
Jumlah	-	-

a) Kas di Kas Daerah.....Rp0,00

Saldo Kas di Kas Daerah pada tahun 2019 sebesar Rp0,00, sedangkan Kas Daerah per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 yang terdiri atas penempatan berupa giro dan deposito pada Bank, dengan rincian saldo sebagai berikut:

Kas di Kas Daerah:	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
1) Rekening Giro	-	-
2) Rekening Deposito	-	-
Jumlah	-	-



1) Rekening Giro.....Rp0,00

Rekening giro bank adalah dana yang merupakan bagian dari kekayaan milik Pemerintah Daerah yang ditempatkan di bank dalam bentuk rekening giro. Rekening giro per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00, sedangkan rekening giro per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00. Adapun rincian dari rekening giro per 31 Desember 2020 adalah sebagaimana berikut:

<i>Rekening Giro:</i>	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
Bank BPD Jateng Cab Purwodadi No. 1-017-00343-9	-	-
Jumlah	-	-

Dari rekening giro tersebut diatas penggunaan adalah sebagai berikut:

Rekening giro Bank BPD Jateng Cabang Purwodadi A/C No.1-017-00343-9 atas nama Bendahara Pengeluaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan merupakan rekening Kas Penerimaan APBD Kabupaten Grobogan.

2) Deposito.....Rp0,00

Deposito Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00, sedang kan jumlah deposito per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00.

b) Kas di Bendahara Pengeluaran.....Rp0,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan Kas (uang) tunai maupun jumlah Kas (uang) yang berada di rekening bank bendahara pengeluaran SKPD per 31 Desember 2020. Kas di Bendahara pengeluaran tahun 2019 sebesar Rp0,00, adapun pada tahun 2020 saldo kas



di bendahara pengeluaran SKPD sebesar Rp0,00
sebagaimana tabel berikut:

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
Jumlah	-	-

c) Kas di Bendahara Penerimaan.....Rp0,00

Pada tahun 2019 kas bendahara penerimaan sebesar Rp0,00, sedangkan pada tahun 2020 sebesar Rp0,00 Kas bendahara penerimaan tahun 2019 berupa kas di bendahara penerimaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan yang merupakan pendapatan lain-lain pendapatan yang sah akhir Desember 2020.

2. Piutang Pajak.....Rp0,00

Akun Piutang Pajak menggambarkan hak Pemerintah Daerah dari pajak daerah yang sampai dengan 31 Desember 2020 belum diterima pembayarannya dari wajib pajak. Saldo piutang pajak pada tahun 2019 sebesar Rp0,00.

3. Piutang Retribusi.....Rp0,00

Akun piutang retribusi menggambarkan hak Pemerintah Daerah dari pengenaan retribusi daerah yang sampai dengan 31 Desember 2020 belum diterima pembayarannya. Pada tahun 2019 piutang retribusi tercatat sebesar Rp0,00, sedangkan jumlah Piutang Retribusi per 31 Desember 2020 sebelum penyisihan adalah sebesarRp0,00.

4. Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan ngsuranRp0,00

Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran adalah merupakan hak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan yang belum diterima pembayarannya.

5. Piutang Dana Bagi Hasil.....Rp0,00

Piutang kepada pemerintah pusat adalah merupakan piutang kurang salur atas dana bagi hasil pajak pusat ke daerah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Kabupaten Grobogan tidak mengelola piutang dana bagi hasil.

6. Penyisihan Piutang.....Rp0,00

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan tidak mengelola penyisihan piutang.

7. Persediaan.....Rp2.712.824.687,40

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, yang masih berada di Satuan Kerja Perangkat Daerah. Jumlah persediaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.738.583.344,00 sedangkan pada tahun 2020 sebesar Rp2.712.824.687,40 dengan rincian sebagai berikut:

<i>Persediaan</i>	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1 ALAT TULIS KANTOR	730.970.650,00	2.738.583.344,00
2 KERTAS DAN COVER	7.502.000,00	-
3 BAHAN KOMPUTER	1.971.704.037,40	-
4 PERABOT KANTOR	1.448.000,00	-
5 ALAT LISTRIK	1.050.000,00	-
6 ALAT/BAHAN UNTUK KEG KANTOR LAINNYA	150.000,00	-
Jumlah	2.712.824.687,40	2.738.583.344,00

Persediaan dinilai berdasarkan hasil perhitungan fisik (*opname*) terhadap persediaan dengan menggunakan harga perolehan terakhir dan/atau nilai wajar yang ditetapkan oleh pengurus barang, sesuai dengan Berita Acara Stock Opname Persediaan Barang Pakai Habis Nomor : 027.1/...../2020 Tanggal 30 Desember 2020.

B. Investasi Jangka Panjang.....Rp0,00

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan tidak mengelola Investasi Jangka Panjang.



C. Aset Tetap.....Rp6.465.057.775,33

Dalam laporan keuangan aset tetap merupakan salah satu pos di neraca di samping aset lancar, investasi jangka panjang, dana cadangan, dan aset lainnya. Aset tetap ini mempunyai peranan yang sangat penting karena mempunyai nilai yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan komponen neraca lainnya, sedangkan Pengertian Aset Tetap dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap yang tercantum dalam neraca Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan per 31 Desember 2019 sebesar Rp Rp6.851.685.178,19 Asset tetap tersebut pada tahun 2020 turun menjadi Rp6.465.057.775,33 yang merupakan akumulasi nilai aset tetap per 31 Desember 2019 audited ditambah dengan penambahan aset tahun 2020 dikurangi dengan pengurangan aset tahun 2020.

Pada tahun 2020 terdapat mutasi bersih Aset Tetap sebesar Rp675.221.048,00 Yang terdiri atas penambahan nilai Aset Tetap sebesar Rp709.221.048,00 dan pengurangan nilai Aset Tetap sebesar Rp34.000.000,00 Penambahan dan Pengurangan nilai Aset Tetap tersebut terdiri atas:

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Penambahan aset tetap dari belanja	691.621.048,00
2	Penerimaan aset dari donasi/hibah	-
3	Penambahan aset mutasi masuk dari SKPD lain	-
4	Penambahan aset tetap yang belum tercatat	-
5	Kapitalisasi dari belanja barang/jasa	17.600.000,00
6	Koreksi pembukuan yang menambah nilai aset	-
	Jumlah	709.221.048,00

Sedangkan pengurangan nilai Aset Tetap terdiri atas:



Pemerintah Kabupaten Grobogan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Penghapusan aset tetap	-
2	Pengurangan aset karena dihibahkan ke masyarakat	-
3	Pengurangan karena dibawah nilai kapitalisasi	-
4	Mutasi ke SKPD lain	-
5	Reklasifikasi keluar ke akun lain yang mengubah jumlah total aset tetap	34.000.000,00
6	Koreksi pembukuan yang mengurangi nilai aset	-
7	Pengurangan karena validasi lainnya	-
	Jumlah	34.000.000,00

Rincian masing-masing komponen penambahan dan pengurangan aset tetap tersebut di atas adalah sebagai berikut:

	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Jumlah
a. Penambahan Aset Tetap:							
1. Dari belanja	-	691.621.048,00	-	-	-	-	691.621.048,00
2. Dari Hibah	-	-	-	-	-	-	-
3. Mutasi masuk dari SKPD lain	-	-	-	-	-	-	-
4. Aset yang sebelumnya tidak	-	-	-	-	-	-	-
5. Kapitalisasi	-	17.600.000,00	-	-	-	-	17.600.000,00
6. Koreksi pembukuan	-	-	-	-	-	-	-
7. Dari dana BOS	-	-	-	-	-	-	-
8. Validasi Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
	-	709.221.048,00	-	-	-	-	709.221.048,00
b. Pengurangan Aset Tetap:							
1. Penghapusan aset tetap	-	-	-	-	-	-	-
2. Dihibahkan ke masyarakat	-	-	-	-	-	-	-
3. Dibawah nilai kapitalisasi	-	-	-	-	-	-	-
4. Mutasi ke SKPD lain	-	-	-	-	-	-	-
5. Reklasifikasi	-	34.000.000,00	-	-	-	-	34.000.000,00
6. Koreksi pembukuan	-	-	-	-	-	-	-
7. Validasi lainnya	-	-	-	-	-	-	-
	-	34.000.000,00	-	-	-	-	34.000.000,00
Jumlah mutasi bersih	-	675.221.048,00	-	-	-	-	675.221.048,00

C.1 Tanah..... Rp320.000.000,00

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk



digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan tetap dicatat sebagai tanah yang tercatat sebagai tanah yang terpisah dari aset tetap yang dibangun diatas tanah tersebut. Pada neraca Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan tahun 2019 tercatat nilai tanah sebesar Rp320.000.000,00 sedangkan pada tahun 2020 nilai tanah tersebut menjadi Rp320.000.000,00. Penjelasan atas mutasi tanah selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Saldo awal (Neraca Th. 2020)	320.000.000,00
Penambahan Tanah:	
1. Dari belanja	-
2. Dari Hibah	-
3 Mutasi masuk dari SKPD lain	-
4 Aset yang sebelumnya tidak tercatat	-
5 Reklasifikasi	-
6 Koreksi pembukuan	-
7 Dari dana BOS	-
8 Validasi Lainnya	-
Jumlah penambahan	-
Pengurangan Tanah:	
1 Penghapusan aset tetap	-
2 Dihilangkan ke masyarakat	-
3 Dibawah nilai kapitalisasi	-
4 Mutasi ke SKPD lain	-
5 Reklasifikasi	-
6. Koreksi pembukuan	-
7. Validasi lainnya	-
Jumlah pengurangan	-
Jumlah mutasi bersih	-
Saldo akhir (Neraca Th. 2020)	320.000.000,00

C.2 Peralatan dan Mesin..... Rp7.046.413.529,00

Peralatan dan Mesin yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah peralatan dan mesin yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam



Pemerintah Kabupaten Grobogan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap yang dapat diklasifikasikan dalam peralatan dan mesin ini mencakup antara lain alat berat, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio komunikasi dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, alat persenjataan, komputer, alat eksplorasi, alat pemboran, alat produksi pengolahan dan pemurnian, alat keselamatan kerja, alat peraga, dan unit peralatan proses produksi. Pada tahun 2019 aset tetap peralatan dan mesin pada neraca Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan tercatat sebesar Rp6.371.192.481,00 sedangkan pada tahun 2020 nilai peralatan dan mesin tersebut naik menjadi Rp7.046.413.529,00. Penjelasan atas mutasi peralatan dan mesin selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Saldo awal (Neraca Th. 2019)	6.371.192.481,00
Penambahan Peralatan dan Mesin:	
1. Dari belanja	691.621.048,00
2. Dari Hibah	-
3 Mutasi masuk dari SKPD lain	-
4 Aset yang sebelumnya tidak tercatat	-
5 Reklasifikasi	17.600.000,00
6 Koreksi pembukuan	-
7 Dari dana BOS	-
8 Validasi Lainnya	-
Jumlah penambahan	709.221.048,00
Pengurangan Peralatan dan Mesin:	
1 Penghapusan aset tetap	-
2 Dihilangkan ke masyarakat	-
3 Dibawah nilai kapitalisasi	-
4 Mutasi ke SKPD lain	-
5 Reklasifikasi	34.000.000,00
6. Koreksi pembukuan	-
7. Validasi lainnya	-
Jumlah pengurangan	34.000.000,00
Jumlah mutasi bersih	675.221.048,00
Saldo akhir (Neraca Th. 2020)	7.046.413.529,00



Mutasi bersih peralatan dan mesin selama tahun 2020 sebesar Rp675.221.048,00 diperoleh dari Penambahan peralatan dan mesin sebesar Rp709.221.048,00 dan Pengurangan peralatan dan mesin sebesar Rp34.000.000,00. Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan terdapat penambahan peralatan dan mesin dari belanja modal sebesar Rp691.621.048,00,00 dan dari belanja barang dan jasa sebesar Rp17.600.000,00. Disamping penambahan tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan juga terdapat pengurangan peralatan dan mesin sebesar Rp34.000.000,00 yang berupa pengurangan aset reklasifikasi ke aset lain-lain (barang rusak berat) sebesar Rp34.000.000,00.

C.3 Gedung dan Bangunan Rp4.636.612.667,00

Definisi dari gedung dan bangunan menurut UU nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung, bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Gedung dan Bangunan yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah gedung dan bangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Termasuk dalam jenis gedung dan bangunan ini antara lain bangunan gedung, monumen, bangunan menara, dan rambu-rambu. Pada tahun 2019 aset tetap gedung dan bangunan pada neraca Dinas



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan tercatat sebesar Rp4.636.612.667,00 sedangkan pada tahun 2020 nilai gedung dan bangunan tersebut menjadi sebesar Rp4.636.612.667,00. Penjelasan atas mutasi gedung dan bangunan selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Saldo awal (Neraca Th. 2019)	4.636.612.667,00
Penambahan Gedung dan Bangunan:	
1. Dari belanja	-
2. Dari Hibah	-
3 Mutasi masuk dari SKPD lain	-
4 Aset yang sebelumnya tidak tercatat	-
5 Kapitalisasi	-
6 Koreksi pembukuan	-
7 Dari dana BOS	-
8 Validasi Lainnya	-
Jumlah penambahan	-
Pengurangan Gedung dan Bangunan:	
1 Penghapusan aset tetap	-
2 Dihilangkan ke masyarakat	-
3 Dibawah nilai kapitalisasi	-
4 Mutasi ke SKPD lain	-
5 Reklasifikasi	-
6. Koreksi pembukuan	-
7. Validasi lainnya	-
Jumlah pengurangan	-
Jumlah mutasi bersih	-
Saldo akhir (Neraca Th. 2020)	4.636.612.667,00

C.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan..... Rp115.350.540,00

Definisi Jalan, Irigasi, dan Jaringan menurut PSAP nomor 07 Paragraf 11 menyatakan bahwa Jalan, Irigasi, dan Jaringan mencakup Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut selain digunakan dalam kegiatan pemerintah juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Termasuk dalam klasifikasi/jenis Jalan, Irigasi, dan Jaringan ini antara lain Jalan dan Jembatan, bangunan air, instalasi, dan Jaringan. Pada tahun 2019 aset



Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada neraca Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan tercatat sebesar Rp115.350.540,00 sedangkan pada tahun 2020 nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut tetap menjadi Rp115.350.540,00. Penjelasan atas mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Saldo awal (Neraca Th. 2019)	115.350.540,00
Penambahan Jalan, Irigasi, dan Jaringan:	
1. Dari belanja	-
2. Dari Hibah	-
3 Mutasi masuk dari SKPD lain	-
4 Aset yang sebelumnya tidak tercatat	-
5 Reklasifikasi	-
6 Koreksi pembukuan	-
7 Dari dana BOS	-
8 Validasi Lainnya	-
Jumlah penambahan	-
Pengurangan Jalan, Irigasi, dan Jaringan:	
1 Penghapusan aset tetap	-
2 Dihilangkan ke masyarakat	-
3 Dibawah nilai kapitalisasi	-
4 Mutasi ke SKPD lain	-
5 Reklasifikasi	-
6. Koreksi pembukuan	-
7. Validasi lainnya	-
Jumlah pengurangan	-
Jumlah mutasi bersih	-
Saldo akhir (Neraca Th. 2020)	115.350.540,00

C.5 Aset Tetap Lainnya..... Rp2.500.000,00

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap diatas tetapi memenuhi definisi aset tetap. Aset tetap lainnya ini dapat meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak kesenian/budaya/olahraga. Pada tahun 2019 aset tetap lainnya pada neraca Pemerintah Kabupaten Grobogan tercatat sebesar Rp2.500.000,00 sedangkan pada tahun 2020

nilai aset tetap lainnya tersebut tetap menjadi Rp2.500.000,00. Penjelasan atas mutasi aset tetap lainnya selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:



Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Saldo awal (Neraca Th. 2019)	2.500.000,00
Penambahan Aset Tetap Lainnya:	
1. Dari belanja	-
2. Dari Hibah	-
3. Mutasi masuk dari SKPD lain	-
4. Aset yang sebelumnya tidak tercatat	-
5. Reklasifikasi	-
6. Koreksi pembukuan	-
7. Dari dana BOS	-
8. Validasi Lainnya	-
Jumlah penambahan	-
Pengurangan Aset Tetap Lainnya:	
1. Penghapusan aset tetap	-
2. Dihilangkan ke masyarakat	-
3. Dibawah nilai kapitalisasi	-
4. Mutasi ke SKPD lain	-
5. Reklasifikasi	-
6. Koreksi pembukuan	-
7. Validasi lainnya	-
Jumlah pengurangan	-
Jumlah mutasi bersih	-
Saldo akhir (Neraca Th. 2020)	2.500.000,00

C.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan..... Rp0,00

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Pada tahun 2019 Konstruksi Dalam Pengerjaan pada neraca Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan tercatat sebesar Rp0,00. Penjelasan atas mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:



Saldo awal (Neraca Th. 2019)	-
Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan:	
1. Dari belanja	-
2. Koreksi pembukuan	-
3. Dari dana BOS	-
4. Validasi Lainnya	-
Jumlah penambahan	-
Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan:	
1. Penghapusan aset tetap	-
2. Reklasifikasi	-
3. Koreksi pembukuan	-
4. Validasi lainnya	-
Jumlah pengurangan	-
Jumlah mutasi bersih	-
Saldo akhir (Neraca Th. 2020)	-

C.7 Akumulasi Penyusutan Rp5.655.818.960,67

Saldo akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp4.593.970.509,81 sedangkan pada tahun 2020 sebesar Rp5.655.818.960,67. Akumulasi aset tetap merupakan kontra akun aset tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan (KDP). Pada tahun 2019 berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 47 Tahun 2016 tentang kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Grobogan Perhitungan penyusutan aset tetap berubah menjadi secara tahunan (per tahun). Dengan perubahan tersebut maka akan terjadi selisih nilai akumulasi penyusutan per 31 Desember 2019 (audited) yang dihitung per bulan dengan akumulasi penyusutan per 31 Desember 2020 yang dihitung per tahun. Selisih tersebut telah dilakukan penyesuaian dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2020 khususnya dalam penyusunan neraca awal untuk



akun akumulasi penyusutan. Adapun perhitungan jumlah selisih tersebut adalah sebagaimana tabel berikut:

NOMOR	URAIAN	AKUMULASI PENYUSUTAN PER 31-12-2019 (PER TAHUN)	PENYESUAIAN AKUMULASI PENYUSUTAN		PENYUSUTAN TAHUN 2020	AKUMULASI PENYUSUTAN PER 31-12-2020
			BERTAMBAH	BERKURANG		
1	Peralatan dan Mesin	4.209.139.257,13	-	34.000.000,00	1.003.508.590,15	5.178.647.847,28
2	Gedung dan Bangunan	366.348.167,68	-	-	89.592.059,04	455.940.226,72
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	18.483.085,00	-	-	2.747.801,67	21.230.886,67
4	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-
	Jumlah	4.593.970.509,81	-	34.000.000,00	1.095.848.450,86	5.655.818.960,67

Selain aset tetap sebagaimana dijelaskan diatas, terdapat barang-barang *extracountable*, yaitu barang-barang yang memiliki umur ekonomis lebih dari satu tahun, namun nilainya dibawah nilai minimum kapitalisasi aset tetap. Saldo barang-barang *extracountable* per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp17.197.655,12 sedangkan pada tahun 2019 sama sebesar Rp17.197.655,12 dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	TAHUN 2020	TAHUN 2019
1	Peralatan dan Mesin	17.197.655,12	17.197.655,12
2	Gedung dan Bangunan	-	-
3	Aset Tetap Lainnya	-	-
	Jumlah	17.197.655,12	17.197.655,12

Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan tidak terdapat penambahan barang-barang extracountable.

D. Dana CadanganRp0,00

E. Aset Lainnya..... Rp37.783.968,94

Aset lainnya merupakan asset Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai asset lancar, investasi jangka panjang, asset tetap, atau dana cadangan. Jumlah Aset Lainnya tahun 2019 sebesar Rp48.274.410,74 sedangkan pada tahun 2020



Pemerintah Kabupaten Grobogan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

sebesar Rp37.783.968,94 yang terdiri atas tagihan penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tidak berwujud, aset lain-lain. Penambahan nilai aset lainnya berasal dari koreksi pembukuan yang dengan nilai aset lainnya yang ada di BMD, dan akumulasi aset lain-lain dengan rincian saldo sebagai berikut:

<i>Aset Lainnya:</i>	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
Tuntutan Ganti Rugi	-	-
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
Aset Tidak Berwujud	142.197.409,00	142.197.409,00
Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(120.473.085,60)	(109.982.642,80)
Aset Lain-lain	170.657.550,00	136.657.549,34
Akumulasi Aset Lain-lain	(154.597.905,46)	(120.597.904,80)
	<u>37.783.967,94</u>	<u>48.274.410,74</u>

1. Tagihan Penjualan Angsuran.....Rp0,00

Saldo tagihan penjualan angsuran per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan tidak mengelola Tagihan Penjualan Angsuran.

2. Tuntutan Ganti Rugi.....Rp0,00

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan tidak mengelola Tuntutan Ganti Rugi.

3. Kemitraan dengan Pihak Ketiga.....Rp0,00

Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan tidak mengelola Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

4. Aset Tidak Berwujud.....Rp21.724.324,40

Aset Tidak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan untuk memperoleh



Pemerintah Kabupaten Grobogan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

suatu asset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa yang akan datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan. Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan untuk asset tidak berwujud yang telah tercatat di neraca sesuai dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 47 tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Grobogan tidak dilakukan amortisasi (penyusutan), hal ini karena seluruh asset tidak berwujud yang telah tercatat tidak diketahui masa manfaatnya baik masa manfaat yang berkaitan dengan harapan entitas untuk menggunakan asset tidak berwujud tersebut maupun faktor hukum atau faktor ekonomis yang membatasinya seperti masa manfaat berdasarkan dokumen perjanjian. Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2019 sebesar Rp142.197.409,00 pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp142.197.409,00 dengan Amortisasi sebesar (Rp120.473.084,60).

Nama Software/Aplikasi	2020	2019
Lisensi Pendukung Siak	-	-
OS Server	6.365.051,00	6.365.051,00
OS PC	1.768.070,00	1.768.070,00
Ms Office	1.343.733,00	1.343.733,00
Antivirus	454.646,00	454.646,00
Aplikasi Pendaftaran Pelaksanaan Perda 4 Tahun 2014	22.421.700,00	22.421.700,00
Aplikasi Simakdes	38.032.000,00	38.032.000,00
Aplikasi Pendaftaran Online (Update Simakdes)	9.710.000,00	9.710.000,00
Aplikasi SIMPEDA	9.650.000,00	9.650.000,00
Aplikasi Bunga Rampai Permasalahan Kependudukan	20.625.000,00	20.625.000,00
Pengembangan Aplikasi dan Pengamanan Database Server	28.110.000,00	28.110.000,00
OS Windows MICROSOFT (Win Pro) Win Pro 10 SINGL OLP NL	3.717.209,00	3.717.209,00
	142.197.409,00	142.197.409,00



Penjelasan atas mutasi aset tidak berwujud selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Saldo awal (Neraca Th. 2019)	142.197.409,00
Penambahan Aset Tidak Berwujud:	
1. Dari belanja	-
2. Dari Hibah	-
3 Mutasi masuk dari SKPD lain	-
4 Aset yang sebelumnya tidak tercatat	-
5 Reklasifikasi	-
6 Koreksi pembukuan	-
7 Dari dana BOS	-
8 Validasi Lainnya	-
Jumlah penambahan	-
Pengurangan Aset Tidak Berwujud:	
1 Penghapusan aset tetap	-
2 Dihilangkan ke masyarakat	-
3 Dibawah nilai kapitalisasi	-
4 Mutasi ke SKPD lain	-
5 Reklasifikasi	-
6. Koreksi pembukuan	-
7. Validasi lainnya	-
Jumlah pengurangan	-
Jumlah mutasi bersih	-
Saldo akhir (Neraca Th. 2020)	142.197.409,00

Mutasi bersih aset tidak berwujud selama tahun 2020 sebesar Rp0,00.

5. Aset Lain-lain.....Rp170.657.549,01

Asset lain-lain digunakan untuk mencatat asset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud dan kemitraan dengan pihak ketiga. Salah satu yang termasuk dalam kategori aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah. Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain, dimana aset ini dinilai sebesar menurut nilai tercatatnya. Aset Lain-lain per 31 Desember 2019 sebesar Rp136.657.549,34 dan pada tahun 2020 tetap sebesar Rp170.657.549,01. Aset Lain-lain ini adalah merupakan



aset dalam kondisi rusak berat yang telah diajukan usulan penghapusannya dan menunggu untuk penetapan surat keputusan penghapusan, aset rusak berat diatas berupa aset tetap peralatan mesin. Penjelasan atas mutasi aset lain-lain selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Saldo awal (Neraca Th. 2019)	136.657.549,34
Penambahan Aset Lainnya:	
1. Dari belanja	-
2. Dari Hibah	-
3 Mutasi masuk dari SKPD lain	-
4 Aset yang sebelumnya tidak tercatat	-
5 Reklasifikasi	34.000.000,00
6 Koreksi pembukuan	-
7 Dari dana BOS	-
8 Validasi Lainnya	-
Jumlah penambahan	34.000.000,00
Pengurangan Aset Lainnya:	
1 Penghapusan aset tetap	-
2 Dihilangkan ke masyarakat	-
3 Dibawah nilai kapitalisasi	-
4 Mutasi ke SKPD lain	-
5 Reklasifikasi	-
6. Koreksi pembukuan	-
7. Validasi lainnya	-
Jumlah pengurangan	-
Jumlah mutasi bersih	34.000.000,00
Saldo akhir (Neraca Th. 2020)	170.657.549,34

Mutasi bersih aset lainnya selama tahun 2019 sebesar Rp34.000.000,00 diperoleh dari reklasifikasi aset tetap kendaraan dinas karena rusak berat.

6. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain (Rp154.597.904,80)

Akumulasi penyusutan asset lain-lain pada tahun 2019 sebesar (Rp120.597.904,80) sedangkan tahun 2020 menjadi (Rp154.597.904,80). Akumulasi penyusutan aset lain-lain tersebut merupakan dari penyusutan aset tetap yang dalam kondisi rusak berat, penambahan akumulasi penyusutan aset lain-lain dikarenakan reklasifikasi aset lain-lain sebesar (Rp34.000.000,00).

2. KewajibanRp6.224.126,00

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya



ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan per 31 Desember 2019 sebesar Rp8.590.413,00. Kewajiban tersebut mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi sebesar Rp6.224.126,00 yang terbagi ke dalam kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang sebagaimana rincian berikut:

<i>Kewajiban:</i>	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1 Kewajiban Jangka Pendek	6.224.126,00	8.590.413,00
2 Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	<u>6.224.126,00</u>	<u>8.590.413,00</u>

1. Kewajiban Jangka Pendek.....Rp6.224.126,00

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan tahun 2019 sebesar Rp8.590.413,00 sedangkan pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp6.224.126,00 yang meliputi Utang Beban sebagaimana rincian berikut:

<i>Kewajiban Jangka Pendek</i>	31 Desember 2020	31 Desember 2019
a Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
b Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		
c Pendapatan diterima dimuka		
d Utang Beban	6.224.126,00	8.590.413,00
e Utang Jangka Pendek Lainnya		
	<u>6.224.126,00</u>	<u>8.590.413,00</u>

a. Utang Perhitungan Pihak KetigaRp0,00

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2020 merupakan bagian dari Kas yang menjadi hak (klaim) pihak ketiga.

b. Utang Beban Rp6.224.126,00

Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2020 terdiri dari rincian:



NO	URAIAN	JUMLAH
1	Utang Beban Telepon	Rp 94.200,00
2	Utang Beban Air/PDAM	Rp 127.700,00
3	Utang Beban Listrik	Rp 6.002.226,00
4	Utang Beban Kawat/Internet/Intranet	Rp -
5	Utang Beban Gaji	Rp -
Jumlah		Rp 6.224.126,00

2. Kewajiban Jangka Panjang.Rp0,00

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban lainnya yang bukan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek, adapun saldo kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00

3. Ekuitas.....Rp9.209.442.305,67

Ekuitas adalah menunjukkan kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Ekuitas pada neraca Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan tahun 2019 sebesar Rp9.629.952.519,93 dan pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp9.209.442.305,67. Penjelasan lebih lanjut mengenai ekuitas diuraikan pada penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Ekuitas Dana:		
1 Ekuitas	9.209.442.305,67	9.629.952.519,93
Jumlah Ekuitas Dana	9.209.442.305,67	9.629.952.519,93



3.2 LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Kabupaten Grobogan yang tercermin dalam Pendapatan-LO, Beban dan Surplus/(Defisit) operasional Pemerintah Kabupaten Grobogan per 31 Desember 2020.

1. **PENDAPATAN LO.....Rp0,00**

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Grobogan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran 2020 dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat:

- Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*), atau
- Pendapatan telah direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

Pendapatan-LO diukur berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan. Transaksi pendapatan-LO dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Realisasi pendapatan-LO tahun 2020 sebesar Rp15.956.600,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp15.956.600,00 atau 100 persen jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan-LO tahun 2019. Pendapatan LO mengalami penurunan karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan tidak menerima penerimaan hibah.

Realisasi Pendapatan-LO tahun 2020 dan tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut:



No	Pendapatan-LO	Tahun 2020	Tahun 2019	Kenaikan/(Penurunan)
1	Pendapatan Asli Daerah-LO	-	-	-
2	Pendapatan Transfer-LO	-	-	-
3	Lain-lain PAD Yang Sah-LO	-	15.956.600,00	(15.956.600,00)
4	Suprlus Non Operasional-LO	-	-	-
5	Pendapatan Luar Biasa-LO	-	-	-
Jumlah Pendapatan-LO		-	15.956.600,00	(15.956.600,00)

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO.....Rp0,00

Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LO tahun 2020 dan tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut:

No	Pendapatan Asli Daerah-LO	Tahun 2020	Tahun 2019	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Pendapatan Pajak Daerah-LO	-	-	-
2	Pendapatan Retribusi Daerah-LO	-	-	-
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO	-	-	-
4	Lain-lain PAD Yang Sah-LO	-	15.956.600,00	(15.956.600,00)
Jumlah Pendapatan Asli Daerah-LO		-	15.956.600,00	(15.956.600,00)

Pendapatan Asli Daerah-LO tahun 2020 sebesar Rp0,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp15.956.600,00 atau 100 persen jika dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah-LO tahun 2019.

Pencapaian Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah-LO sebesar Rp0,00.

1) Pendapatan Transfer-LO sebesar Rp0,00

Pendapatan Transfer-LO berasal dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Pemerintah Provinsi. Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Grobogan tidak mendapatkan transfer baik dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi.

2) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO sebesar.....Rp0,00



Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO berasal dari pendapatan hibah baik berupa barang maupun dalam bentuk uang.

3) Surplus Non Operasional-LO sebesar Rp0,00

- i. Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO sebesar Rp00,00 dikarenakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak melakukan penjualan/penghapusan aset tetap dan aset lainnya.
- ii. Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Grobogan sebesar Rp0,00
- iii. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan sebesar Rp0,00

2. BEBAN LO..... Rp10.540.394.045,26

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban diakui pada saat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang disebabkan oleh timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya pengeluaran.

Beban diukur dan dicatat sebesar

- Kewajiban yang harus ditunaikan dimasa yang akan datang,
- Nilai aset yang dikonsumsi,
- Nilai penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Realisasi beban-LO tahun 2020 dan tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut:

No.	Jenis Beban	Tahun 2020	Tahun 2019	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Beban Operasi	10.540.394.045,26	11.836.320.569,90	(1.295.926.524,64)
2	Beban Transfer	-	-	-
3	Defisit Non Operasional	-	-	-
4	Beban Luar Biasa	-	-	-
	Jumlah	10.540.394.045,26	11.836.320.569,90	(1.295.926.524,64)



Beban-LO tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp1.295.926.524,64 atau 10,95 persen jika dibandingkan dengan Beban-LO tahun 2019. Dalam penjelasan CALK tentang Beban-LO berikut akan diuraikan beban berdasarkan jenisnya yang terdiri dari Beban Operasi, Beban Transfer, Defisit Non Operasional, dan Beban Luar Biasa.

A. Beban Operasi..... Rp10.540.394.045,26

Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai LO, Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi dan lain-lain. Beban Operasi tahun 2020 sebesar Rp10.540.394.045,26 mengalami penurunan sebesar Rp1.295.926.524,64 atau 10,95 persen jika dibandingkan dengan Beban Operasi tahun 2019. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

No.	Jenis Beban	Tahun 2020	Tahun 2019	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Beban Pegawai - LO	2.870.310.616,00	3.093.473.451,00	(223.162.835,00)
2	Beban Persediaan	3.875.453.768,60	4.739.323.357,00	(863.869.588,40)
3	Beban Jasa	2.242.314.024,00	1.871.931.767,00	370.382.257,00
4	Beban Pemeliharaan	124.197.700,00	236.225.050,00	(112.027.350,00)
5	Beban Perjalanan Dinas	321.779.044,00	803.972.718,00	(482.193.674,00)
6	Beban Hibah	-	26.812.500,00	(26.812.500,00)
7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.106.338.892,66	1.064.581.726,90	41.757.165,76
	Jumlah	10.540.394.045,26	11.836.320.569,90	(1.295.926.524,64)

1. Beban Pegawai-LO.....Rp2.870.310.616,00

Tahun 2020 Beban Pegawai-LO sebesar Rp2.870.310.616,00 mengalami penurunan sebesar Rp223.162.836,00 atau 7,21 persen jika dibandingkan dengan Beban Pegawai-LO tahun 2019. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:



Beban Pegawai - LO

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Beban Gaji dan Tunjangan -LO	2.870.310.616,00	3.093.473.451,00	(223.162.835,00)
2	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	-	-	-
	Jumlah	2.870.310.616,00	3.093.473.451,00	(223.162.835,00)

Belanja Pegawai-LRA sebesar Rp2.870.310.616,00 sedangkan Beban Pegawai-LO sebesar Rp2.870.310.616,00. Jadi tidak terdapat selisih, karena tidak terdapat utang pegawai selama tahun 2020 sehingga tidak menambah beban pegawai-LO. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Belanja Pegawai-LRA ke Beban Pegawai - LO

No	Uraian	LRA	Debet		Kredit		LO
			Utang Beban Pegawai th.2019	Utang Beban Pegawai th.sebelumnya yg dibayar th.2020	Reclas Beban Kredit		
1	Beban Gaji dan Tunjangan	2.870.310.616,00	-	-	-	2.870.310.616,00	
2	Beban Tambahan Penghasilan PNS	-	-	-	-	-	
	Jumlah	2.870.310.616,00	-	-	-	2.870.310.616,00	

2. Beban Persediaan-LO..... Rp3.875.453.768,00

Tahun 2020 Beban Persediaan-LO sebesar Rp3.875.453.768,00 mengalami penurunan sebesar Rp863.869.588,40 atau 18,23 persen jika dibandingkan dengan Beban Persediaan-LO tahun 2019. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Beban Persediaan-LO

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Beban Bahan Pakai Habis	2.639.705.948,60	2.416.010.947,00	223.695.001,60
2	Beban Persediaan Bahan/ Material	6.400.000,00	60.355.200,00	(53.955.200,00)
3	Beban Cetak dan Penggandaan	945.777.820,00	1.701.375.210,00	(755.597.390,00)
4	Beban Makanan dan Minuman	247.270.000,00	459.842.000,00	(212.572.000,00)
5	Beban Pakaian Kerja	-	1.900.000,00	(1.900.000,00)
6	Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	36.300.000,00	99.840.000,00	(63.540.000,00)
	Jumlah	3.875.453.768,60	4.739.323.357,00	(863.869.588,40)



Belanja Persediaan-LRA sebesar Rp3.849.695.112,00 sedangkan Beban Persediaan-LO sebesar Rp3.875.453.768,60. Jadi terdapat selisih sebesar Rp25.758.656,60 yang disebabkan karena :

1. Pemakaian persediaan akhir tahun 2019 sebesar Rp2.738.583.344,00 yang menambah beban persediaan-LO.
2. Adanya persediaan akhir tahun 2020 sebesar Rp2.712.824.687,40 yang mengurangi beban persediaan-LO.
3. Adanya reklas barang pakai habis bahan medis ke asset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp17.600.000,00

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Belanja Persediaan LRA ke Beban Persediaan-LO

No	Beban Persediaan	LRA	Debet Jumlah	Kredit Jumlah	Beban LO
1	Beban Bahan Pakai Habis	3.057.304.612,00	1.610.164.374,00	2.027.763.037,40	2.639.705.948,60
2	Beban Persediaan Bahan/ Material	6.400.000,00	-	-	6.400.000,00
3	Beban Cetak dan Penggandaan	502.420.500,00	1.128.418.970,00	685.061.650,00	945.777.820,00
4	Beban Makanan dan Minuman	247.270.000,00			247.270.000,00
5	Beban Pakaian Kerja	-			-
6	Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	36.300.000,00			36.300.000,00
Jumlah		3.849.695.112,00	2.738.583.344,00	2.712.824.687,40	3.875.453.768,60

Belanja Persediaan LRA ke Beban Persediaan-LO

No	Beban Persediaan	Debet			Jumlah
		Pemakaian Persediaan th.2019	Belanja modal yang tidak dikapitalisasi	Reclas Beban	
1	Beban Bahan Pakai Habis	1.610.164.374,00			1.610.164.374,00
2	Beban Persediaan Bahan/ Material				-
3	Beban Cetak dan Penggandaan	1.128.418.970,00			1.128.418.970,00
4	Beban Bantuan Sosial Barang yang Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat				-
Jumlah		2.738.583.344,00	-	-	2.738.583.344,00

Belanja Persediaan LRA ke Beban Persediaan-LO

No	Belanja Persediaan	Kredit				Jumlah
		Persediaan th.2020	Belanja yg dikapitalisasi ke Aset Tetap	Belanja yg dikapitalisasi ke Aset Lain	Reclas Beban	
1	Beban Bahan Pakai Habis	2.027.763.037,40				2.027.763.037,40
2	Beban Persediaan Bahan/ Material	-				-
3	Beban Cetak dan Penggandaan	685.061.650,00				685.061.650,00
4	Beban Bantuan Sosial Barang yang Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat					-
Jumlah		2.712.824.687,40	-	-	-	2.712.824.687,40



3. Beban Jasa – LO.....Rp2.242.314.024,00

Tahun 2020 Beban Jasa-LO sebesar Rp2.242.314.024,00 sedangkan Beban Jasa-LO tahun 2019 adalah Rp1.871.931.767,00 mengalami kenaikan sebesar Rp370.382.257,00 atau 19,79 persen jika dibandingkan dengan Beban Jasa-LO tahun 2019. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Beban Jasa - LO

No	Uraian	2020	2019	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Beban Jasa Kantor	513.754.024,00	455.844.017,00	57.910.007,00
2	Beban Jasa Konsultasi	46.280.000,00	81.581.500,00	(35.301.500,00)
3	Beban Honorarium Non Pegawai	8.930.000,00	23.410.000,00	(14.480.000,00)
4	Beban Honorarium PNS - LO	569.670.000,00	204.500.000,00	365.170.000,00
5	Beban Honorarium Non PNS - LO	1.103.680.000,00	1.106.596.250,00	(2.916.250,00)
Jumlah		2.242.314.024,00	1.871.931.767,00	370.382.257,00

Belanja Jasa-LRA sebesar Rp2.244.680.311,00 sedangkan Beban Jasa-LO sebesar Rp2.242.314.024,00. Jadi terdapat selisih sebesar Rp2.366.287,00 yang dikarenakan karena :

1. Utang beban selama tahun 2020 sebesar Rp6.224.126,00 yang menambah beban jasa-LO.
2. Utang beban tahun sebelumnya yang dibayarkan pada tahun 2020 sebesar Rp8.590.413,00 yang mengurangi beban jasa-LO.

Belanja Jasa-LRA ke Beban Jasa - LO

No	Uraian	LRA	Debet	Kredit	LO
			Jumlah	Jumlah	
1	Beban Jasa Kantor	516.120.311,00	6.224.126,00	8.590.413,00	513.754.024,00
2	Beban Jasa Konsultasi	46.280.000,00	-	-	46.280.000,00
3	Beban Honorarium Non Pegawai	8.930.000,00	-	-	8.930.000,00
4	Beban Honorarium PNS - LO	569.670.000,00	-	-	569.670.000,00
5	Beban Honorarium Non PNS - LO	1.103.680.000,00	-	-	1.103.680.000,00
Jumlah		2.244.680.311,00	6.224.126,00	8.590.413,00	2.242.314.024,00



Belanja Jasa-LRA ke Beban Jasa - L

No	Uraian	DEBET			Kredit			LO
		Utang Beban tahun 2020	Belanja modal yg tidak dikapitalisasi	Jumlah	Utang Beban tahun sebelumnya yang dibayar tahun 2018	Bl. Barang & jasa yg dikapitalisasi ke Aset Tetap	Jumlah	
1	Beban Jasa Kantor	6.224.126,00		6.224.126,00	8.590.413,00	-	8.590.413,00	(2.366.287,00)
2	Beban Sewa Sarana Mobilitas			-			-	-
3	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor			-			-	-
4	Beban Jasa Konsultasi			-			-	-
5	Beban Honorarium Non Pegawai			-			-	-
7	Beban Honorarium PNS - LO			-			-	-
8	Beban Honorarium Non PNS - LO			-			-	-
9	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS		-	-			-	-
	Jumlah	6.224.126,00	-	6.224.126,00	8.590.413,00	-	8.590.413,00	(2.366.287,00)

4. Beban Pemeliharaan-LO.....Rp124.197.700,00

Beban Pemeliharaan-LO Tahun 2020 sebesar Rp124.197.700,00 mengalami penurunan sebesar Rp112.027.350,00 atau 47,42 persen jika dibandingkan dengan Beban-Pemeliharaan LO tahun 2019. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	21.053.700,00	49.020.050,00	(27.966.350,00)
2	Beban Pemeliharaan	103.144.000,00	187.205.000,00	(84.061.000,00)
	Jumlah	124.197.700,00	236.225.050,00	(112.027.350,00)

Belanja Pemeliharaan-LRA sebesar Rp124.197.700,00 sedangkan Beban Pemeliharaan-LO sebesar Rp124.197.700,00. Tidak terdapat selisih antara belanja pemeliharaan -LRA dan Beban Pemeliharaan - LO.

5. Beban Perjalanan Dinas-LO Rp321.779.044,00

Beban Perjalanan Dinas - LO tahun 2020 sebesar Rp321.779.044,00 sedangkan beban perjalanan dinas -LO tahun 2019 sebesar Rp803.972.718,00. Beban perjalanan dinas-LO mengalami penurunan sebesar Rp482.193.674,00 atau sebesar 59,98 persen jika dibandingkan dengan



Beban-Perjalanan Dinas- LO tahun 2019. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Beban Perjalanan Dinas - LO

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	193.010.729,00	359.775.300,00	(166.764.571,00)
2	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	128.768.315,00	444.197.418,00	(315.429.103,00)
	Jumlah	321.779.044,00	803.972.718,00	(482.193.674,00)

Belanja Perjalanan Dinas-LRA sebesar Rp321.779.044,00 sedangkan Beban Perjalanan Dinas -LO sebesar Rp321.779.044,00. Tidak terdapat selisih antara Belanja Perjalanan Dinas-LRA dan Beban Perjalanan Dinas -LO.

6. Beban bunga sebesar Rp0,00

7. Beban Subsidi sebesar Rp0,00

8. Beban HibahRp0,00

Beban Hibah-LO Tahun 2020 sebesar Rp0,00 sedangkan Beban Hibah-LO Tahun 2019 sebesar Rp26.812.500,00. Beban Hibah - LO mengalami penurunan sebesar Rp26.812.500 atau 100 persen jika dibandingkan Beban Hibah-LO Tahun 2019. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Beban Hibah - LO

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Beban Hibah	-	26.812.500,00	(26.812.500,00)
	Jumlah	-	26.812.500,00	(26.812.500,00)

9. Beban Bantuan Sosial sebesar Rp0,00

10. Beban Penyusutan dan Amortisasi.....Rp1.106.338.892,66

Beban penyusutan dan amortisasi tahun 2020 sebesar



Rp1.106.338.892,66 mengalami kenaikan sebesar Rp41.757.165,76 atau 3,92 persen jika dibandingkan dengan Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2019 sebesar Rp1.064.581.726,90. Beban penyusutan tahun 2020 untuk dapat dilihat dalam tabel berikut :

Beban Penyusutan Tahun 2020

No	SKPD	Jumlah
1	Beban Penyusutan Alat-alat Bantu	11.871.428,58
2	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	110.771.970,97
3	Beban Penyusutan Alat Kantor	80.031.238,40
4	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	124.993.038,40
5	Beban Penyusutan Komputer	644.943.502,60
6	Beban Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	6.409.317,00
7	Beban Penyusutan Alat Studio	22.728.094,20
8	Beban Penyusutan Unit-Unit Laboratorium	1.760.000,00
9	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	89.592.059,04
10	Beban Penyusutan Jaringan Listrik	2.747.801,67
11	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	10.490.441,80
	Jumlah	1.106.338.892,66

11. Beban Penyisihan Piutang sebesar Rp0,00

12. Beban Lain-lain sebesar Rp00,00

B. Beban Transfer.....Rp0,00

Beban Transfer terdiri dari Beban Transfer Pajak Daerah, Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya, Beban Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Lainnya, Beban Transfer Bantuan Keuangan kepada Desa, dan Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya, dan Beban Transfer Dana Otonomi Khusus. Beban Transfer pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan tahun 2020 sebesar Rp 00,00

C. Defisit Non OperasionalRp00,00

Defisit Non Operasional terdiri dari Defisit Penjualan Aset Non Lancar-LO, Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO, Defisit dari kegiatan Non Operasional-LO. Defisit Non Operasional-LO tahun 2020 sebesar Rp00,00 mengalami kenaikan sebesar



Rp0,00 atau 100 persen jika dibandingkan dengan Defisit Non Operasional tahun 2019 sebesar Rp0,00.

D. Beban Luar Biasa..... Rp00,00

Beban Luar Biasa sebesar Rp 00,00 adalah beban yang terdapat pada SKPD BPPKAD selaku PPKD yang merupakan belanja tidak terduga di LRA.

SURPLUS/(DEFISIT)-LO.....Rp(10.540.394.045,26)



3.3 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang terdiri atas saldo akhir tahun sebelumnya yang menjadi saldo awal tahun 2020, penambahan surplus atau pengurangan defisit yang berasal dari Laporan Operasional tahun berjalan serta dampak kumulatif karena koreksi perubahan kebijakan dan kesalahan mendasar. Laporan Operasional pada Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang berkaitan dengan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Ekuitas awal pada tahun 2020 terdapat saldo awal ekuitas sebesar Rp9.629.952.519,00 yang merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2019.
2. Surplus/defisit adalah surplus yang berasal dari Laporan Operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan tahun 2020 sebesar Rp(10.540.394.045,26). Defisit ini merupakan defisit atas kegiatan operasional yang mengurangi ekuitas neraca.
3. Kewajiban untuk dikonsolidasikan.
Akun kewajiban untuk dikonsolidasikan (R/K SKPD) menggambarkan transfer dari Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan per 31 Desember 2020. R/K adalah akun resiprokal antara Pemerintah Kabupaten Grobogan dengan SKPD, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan. Akun rekening koran PPKD ini akan bertambah bila SKPD menerima transfer aset seperti menerima SP2D UP/GU dan menerima aset tetap dari Pemerintah Daerah, pelaksanaan belanja LS (Menerima SP2D LS) dan akan berkurang apabila SKPD mentransfer aset ke Pemda (seperti penyetoran aset ke Pemda). Selama tahun 2020,



jumlah R/K PPKD pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan Rp10.119.883.831,00

7. Ekuitas akhir pada tahun 2020 terdapat saldo akhir ekuitas sebesar Rp9.209.442.305,67 yang merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2020.



BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

PEMERINTAH DAERAH

4.1 Letak Geografis Kabupaten Grobogan

Kabupaten Grobogan, adalah salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Tengah, dengan Ibukota di Purwodadi. Secara geografis terletak di 110°15' BT – 111°25' BT dan 7° LS - 7°30' LS, serta di antara dua pegunungan Kendeng utara dan Pegunungan Kendeng Selatan. Sedangkan batas wilayah Kabupaten Grobogan di sebelah barat adalah Kabupaten Semarang dan Demak, di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kudus, Pati dan Blora, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Blora dan Ngawi, sementara di selatan berbatasan dengan Kabupaten Sragen, Boyolali, dan Kabupaten Semarang.

Dengan luas wilayah sebesar 2.022,25 Km² dan secara administratif terdiri 19 kecamatan, 273 desa dan 7 kelurahan serta 1.451 dusun/lingkungan. Kecamatan terbesar adalah Kecamatan Geyer dengan luas 204,98 Km² (9,9%), sedangkan yang terkecil Kecamatan Klambu dengan luas 52,31 Km² (2,2%). Jumlah penduduk menurut data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan yang telah divalidasi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Tertib Administrasi Kependudukan, pada akhir tahun 2020 sebesar 1.483.386 jiwa terdiri dari laki-laki sebesar 745.244 jiwa dan perempuan sebesar 738.142 jiwa, dengan mata pencaharian penduduk didominasi pada jenis mata pencaharian pertanian dan perdagangan.

Target Pencapaian SPM Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 secara regional di tingkat Kabupaten adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Penerbitan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0 – 18 Tahun sebesar 94,15 %
2. Pelayanan Penerbitan Kepemilikan Akta Kematian sebesar 77.701
3. Pelayanan Penerbitan Kepemilikan Kartu Keluarga sebesar 99,48 %
4. Pelayanan Penerbitan KTP Elektronik sebesar 98,24 %



Inovasi dan prestasi yang diraih Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan sampai dengan pada Tahun 2020 antara lain :



PRESTASI DAN INOVASI OPD

A. DATA PRESTASI / PENGHARGAAN YANG DIRAIH PADA TAHUN 2020

NO	TAHUN	JENIS PRESTASI / URAIAN	TINGKAT	KETERANGAN
	2	3	4	5
1.	2018	Piagam Penghargaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan sebagai unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Baik Dengan Catatan Tahun 2018	NASIONAL	Piagam Penghargaan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Informasi dan Birokasi Tanggal 27 November 2018.
2.	2019	Piagam Penghargaan Dispendukcapil Grobogan atas Kerjasamanya dalam Menyukkseskan Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Grobogan Tahun 2019	KABUPATEN	Piagam Penghargaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Tanggal 9 Agustus 2019
3.	2019	Penghargaan peringkat II keterbukaan informasi badan publik kategori Ograninsasi perangkat Daerah Kabupaten Grobogan. Tahun 2019	KABUPATEN	Piala Keterbukaan Informasi Badan Public Organisasi Perangkat Daerah. Tahun 2019
4.	2019	Piagam Penghargaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan sebagai Role Mode Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kategori "Baik" Tahun 2019	NASIONAL	Piagam Penghargaan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Informasi dan Birokasi Tanggal 5 November 2019
5.	2019	Penghargaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan dengan Inovasi "Mencari Kekasihku" sebagai TOP 10 Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019	PROVINSI	Piagam Penghargaan Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 060/53 Tahun 2019 Tentang TOP 10, TOP 20 dan TOP 40 Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019



NO	TAHUN	JENIS PRESTASI / URAIAN	TINGKAT	KETERANGAN
	2	3	4	5
6.	2020	Piagam Penghargaan Museum Rekor - Dunia Indonesia Dianugerahkan Kepada Pemerintah Kabupaten Grobogan atas Rekor Pemrakarsa dan Penyelenggara Pembagaian Kartu Identitas Anak Terbanyak	Dunia Indonesia	- Piagam Penghargaan Museum Rekor - Dunia Indonesia dengan nomor : 9411/R.MURI/I/2020 Tanggal 29 Januari 2020
7.	2020	Manajemen Mutu ISO 9001:2015	INTERNASIONAL	Sertifikat Manajemen Mutu ISO 9001:2015 oleh Quality Register System
8.	2020	Juara 2 untuk Inovasi Ketan Gobat pada Lomba Inovasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tingkat Kabupaten Grobogan Tahun 2020	KABUPATEN	Piala Lomba Inovasi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020
9.	2020	Juara Harapan II untuk Inovasi e-Simpel pada Lomba Inovasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tingkat Kabupaten Grobogan Tahun 2020	KABUPATEN	Piala Lomba Inovasi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020
10.	2020	Penghargaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan sebagai Unit Kerja Pelayanan Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	NASIONAL	Piagam Penghargaan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan atas partisipasi sebagai unit kerja pelayanan berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Tanggal 21 Desember 2020



B. INOVASI YANG DILAKSANAKAN

NO	JENIS INOVASI	TUJUAN INOVASI	KETERANGAN
	2	3	4
1.	Inovasi “MENCARI KEKASIHKU” yaitu Menikah atau Cerai , KK Dan KTP Seketika Itu Kumiliki, yaitu penyerahan KK dan KTP status Perkawinan atau cerai hidup bersamaan dengan Surat Nikah atau Akta Cerai.	Meningkatkan validitas status perkawinan atau perceraian bagi penduduk beragama Islam, memberikan kemudahan dan mempersingkat waktu dalam mengurus perubahan status perkawinan dalam KK dan KTP, serta meningkatkan pemahaman pentingnya pemuatakhiran data kependudukan, sehingga penduduk tidak lagi mengalami kendala ketika memerlukan data dari KK maupun KTP	Mekanisme Inovasi Mencari Kekasihku yaitu 1. Proses Pencatatan Perkawinan Penduduk mendaftarkan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA). Petugas KUA menginput data NIK, nomor dan tanggal surat nikah, dan rencana domisili melalui Aplikasi Mencari Kekasihku. Petugas Dispendukcapil akan merubah data perkawinan dari kedua mempelai dan mengirimkan ke operator Dispendukcapil di kecamatan untuk mencetak KK dan KTP tersebut, untuk kemudian didistribusikan ke KUA. Petugas KUA akan menyerahkan KK dan KTP tersebut bersamaan dengan surat nikah sedangkan KK dan KTP lama akan di tarik oleh petugas KUA dan diserahkan kepada petugas Dispendukcapil di Kecamatan. Dengan Inovasi Mencari Kekasihku, setelah proses ijab qabul pengantin dan keluarganya akan mendapatkan 7 dokumen sekaligus, yaitu 2 surat nikah (bagi pengantin), KK dan 2 KTP pengantin dengan status kawin, KK orang tua pihak laki-laki dan KK orang tua pihak perempuan. Ketika salah



NO	JENIS INOVASI	TUJUAN INOVASI	KETERANGAN
	2	3	4
			<p>satu pasangan pengantin berasal dari luar kabupaten maka persyaratannya harus disertai dengan surat keterangan pindah (SKPWNI) dari daerah asal.</p> <p>2. Proses Perceraian Penduduk mendaftarkan perceraian di Pengadilan Agama, setelah melalui proses persidangan dan sudah berkekuatan hukum tetap, petugas Pengadilan Agama akan menginput NIK , Nomor akta cerai dan tanggal perceraian di aplikasi mencari kekasihku. Petugas Dispendukcapil yang berada di Pengadilan Agama akan merubah status dan mencetak KK dan KTP dengan status cerai hidup. Selanjutnya oleh petugas Pengadilan Agama, KK dan KTP baru dengan status cerai hidup diserahkan kepada pemohon bersamaan dengan Akta Cerai. KK dan KTP lama (dengan status kawin) akan ditarik oleh petugas Pengadilan Agama dan diserahkan kepada petugas Dispendukcapil yang berada di Pengadilan Agama</p>
2.	Inovasi Ketan Gobat yaitu Paket Pelayanan Grobogan Hebat, Pelayanan Akta Kelahiran terintegrasi KK dan KIA	Inovasi Ketan Gobat yaitu Paket Pelayanan Grobogan Hebat, Pelayanan Akta Kelahiran terintegrasi KK dan KIA yang	Bagi Penduduk Kabupaten Grobogan yang melahirkan di Rumah Sakit, Puskesmas atau Klinik Bersalin yang telah bekerjasama dengan Dispendukcapil,



NO	JENIS INOVASI	TUJUAN INOVASI	KETERANGAN
	2	3	4
		bertujuan untuk menyederhanakan proses dan mengintegrasikan dari beberapa proses yakni pengajuan perubahan KK, pembuatan akta kelahiran dan pencetakan KIA menjadi satu pendaftaran sehingga mempercepat proses pelayanan	akan mendapatkan 3 dokumen kependudukan sekaligus yaitu Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak (KIA). Untuk persyaratannya cukup menyerahkan nama anak, KK asli, Fotocopi Surat nikah legalisir dan fotocopi KTP orang tua, sedangkan dari pihak rumah sakit/puskesmas/klinik melengkapi dengan surat keterangan kelahiran anak dan fotocopi KTP petugas sebagai pelapor
3.	Inovasi Ketan Gober yaitu Paket Pelayanan Grobogan Berkah, Pelayanan Akta Kematian terintegrasi KK dan KTP	Inovasi Ketan Gober (Paket Pelayanan Grobogan Berkah , Pelayanan Akta Kematian terintegrasi KK dan KTP) bertujuan untuk merubah mekanisme pencetakan akta kematian dan memberikan kepastian kepemilikan akta kematian bagi penduduk yang meninggal dunia, serta perubahan Kartu Keluarga dan perubahan status KTP untuk keluarga yang di tinggalkan	Dalam pelayanan Ketan Gober, Dispendukcapil melibatkan Petugas Registrasi Desa untuk melaporkan kematian warganya melalui aplikasi Whats App. Oleh Petugas Registrasi Desa, data penduduk yang meninggal meliputi nama penduduk yang meninggal, waktu (tanggal dan jam) meninggal, nama orang tua dari orang yang meninggal dikirim melalui grup whats app dalam format excel yang di tanda tangani kepala desa. Data tersebut diverifikasi oleh Operator Dinas, apabila data sesuai maka akan segera dilakukan penerbitan Akta Kematian serta Kartu Keluarga dan KTP bagi keluarga yang ditinggalkan, yang kemudian akan diambil oleh Petugas Registrasi Desa untuk didistribusikan kepada keluarga yang berduka, dengan



NO	JENIS INOVASI	TUJUAN INOVASI	KETERANGAN
	2	3	4
			membawa persyaratan akta kematian yaitu : KK Asli, KTP asli yang meninggal dan yang ditinggalkan (apabila suami istri), Surat kematian dari desa (F. 2.29) dan Fotocopi KTP pelapor. Untuk Register kematian ditandatangani oleh Petugas Registrasi Desa saat pengambilan dokumen di Dinas.
4.	Inovasi Ketan Gorja yaitu Paket Pelayanan Grobogan Ceria, Pelayanan Surat Pindah terintegrasi KK dan KTP	Inovasi Ketan Gorja (Paket Pelayanan Grobogan Ceria, Pelayanan Surat Pindah terintegrasi KK dan KTP) bertujuan untuk : 1. Menyederhanakan dan mempermudah proses pelayanan sehingga menjadi lebih cepat dan akurat. 2. Memberikan pelayanan yang lebih dekat kepada masyarakat. 3. Memberikan data kependudukan yang akurat sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan daerah.	Mekanismenya adalah Pemohon menyerahkan persyaratan sebagai berikut : Persyaratan Pindah Keluar : KK dan KTP asli dan Alamat tujuan pindah jelas Persyaratan Pindah Datang : Surat keterangan pindah (SKPWN) penduduk dari daerah asal, Biodata penduduk (dari daerah asal), KTP asli, KK asli (bagi yang menumpang atau bergabung dengan KK orang lain) dan Dokumen pendukung (apabila ada perubahan data). Pemohon menyerahkan berkas persyaratan pada loket pendaftaran, kemudian pemohon akan mendapatkan tanda terima untuk mengambil dokumen. Petugas akan memproses pindah keluar dan KK apabila ada anggota keluarga yang di tinggalkan dan mencetak pindah datang sesuai dengan pengajuan, serta mencetak KK dan KTP baru alamat yang baru



NO	JENIS INOVASI	TUJUAN INOVASI	KETERANGAN
	2	3	4
5.	Inovasi Ketan Go Senyum yaitu Paket Pelayanan Grobogan Tersenyum, Pelayanan Akta Perkawinan atau Akta Perceraian Non Islam Terintegrasi KK dan KTP	Inovasi Ketan Go Senyum (Paket Pelayanan Grobogan Tersenyum, Pelayanan Akta Perkawinan atau Akta Perceraian Non Islam Terintegrasi KK dan KTP) bertujuan untuk meningkatkan validitas status perkawinan atau perceraian bagi penduduk beragama non Islam, memberikan kemudahan dan mempersingkat waktu dalam mengurus perubahan status perkawinan dalam KK dan KTP, serta meningkatkan pemahaman pentingnya pemutakhiran data kependudukan, sehingga penduduk tidak lagi mengalami kendala ketika memerlukan data dari KK maupun KTP	<p>Dengan Inovasi KETAN GO SENYUM pengajuan permohonan akta Perkawinan ataupun akta perceraian akan sekaligus mendapatkan KK dan KTP dengan status kawin atau cerai hidup. Prosesnya dengan menyerahkan berkas persyaratan sebelum pelaksanaan perkawinan secara agama untuk kemudian diverifikasi oleh Operator Dispendukcapil. Setelah proses perkawinan secara agama selesai, dilakukan pencatatan perkawinan dengan mendatangkan pasangan pengantin, kedua orang tua dan dua orang saksi. Pasangan pengantin, dan dua orang saksi menandatangani register akta perkawinan. Setelah dinyatakan lengkap, petugas dispendukcapil akan mencetak akta perkawinan dan diserahkan kepada pemohon bersamaan dengan KK dan KTP status kawin, sekaligus mencetak KK orang tua kedua mempelai.</p> <p>Sedangkan untuk proses akta pereraian, pemohon menyerahkan berkas permohonan sesuai dengan syarat yang ditentukan. Petugas dispendukcapil akan memverifikasi berkas permohonan tersebut, apabila di nyatakan lengkap, langsung di terbitkan akta perceraian, KK dan KTP status cerai hidup.</p>



NO	JENIS INOVASI	TUJUAN INOVASI	KETERANGAN
	2	3	4
6.	Inovasi Dalang Perkasa yaitu Datang Langsung Perekaman di Desa	Inovasi Dalang Perkasa (Datang Langsung Perekaman di Desa) bertujuan untuk melakukan perekaman KTP elektronik bagi semua penduduk Kabupaten Grobogan, sehingga penduduk hanya memiliki satu data tunggal kependudukan. Sasaran dari inovasi Dalang Perkasa adalah bagi masyarakat di pedesaan yang belum melakukan perekaman, para lansia serta penyandang disabilitas.	Proses pelaksanaan inovasi Dalang Perkasa adalah 1. Dispendukcapil mengirimkan data penduduk yang belum melakukan perekaman 2. Perangkat desa mengumumkan kepada masyarakat untuk melakukan perekaman sesuai dengan tanggal yang telah di tetapkan 3. Penduduk melakukan perekaman KTP elektronik 4. Pencetakan KTP el dilakukan oleh dinas kependudukan dan didistribusikan kembali kepada pihak desa 5. Pihak desa menyerahkan KTP elektronik kepada masyarakat Khusus penduduk lanjut usia, penyandang disabilitas atau orang dengan gangguan jiwa yang tidak dapat datang ke desa, perekaman KTP elektronik dilakukan rumah masing-masing dengan didampingi oleh perangkat desa setempat.
7.	Inovasi Digitalisasi Arsip Dokumen Kependudukan	Inovasi Digitalisasi Arsip Dokumen Kependudukan bertujuan untuk : 1. Sebagai upaya penyelamatan informasi untuk masa yang	Proses digitalisasi arsip akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan menggunakan scanning bersamaan dengan aplikasi bernama pakcapil (pengelolaan



NO	JENIS INOVASI	TUJUAN INOVASI	KETERANGAN
	2	3	4
		akan datang yaitu untuk menyelamatkan arsip akta kelahiran dengan cara membackup arsip secara fisik. 2. Menghindari ancaman kerusakan dan kehilangan, dengan demikian arsip menjadi lebih aman dan terlindungi. 3. Mempercepat temu kembali arsip sehingga dapat memanfaatkan waktu kerja pegawai menjadi lebih efektif.	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil). Untuk mengoperasikan aplikasi pakcapil dapat dilakukan secara offline. Selain memudahkan proses digitalisasi arsip, adanya aplikasi pakcapil juga dapat membantu untuk melakukan pencarian kembali arsip dengan cepat, karena cukup menggunakan kata kunci nomor induk kependudukan maka data yang dibutuhkan akan ditampilkan diaplikasi tersebut.
8.	Inovasi Informasi Layar Sentuh	Inovasi Layar Sentuh bertujuan untuk : 1. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang perundangan undangan, persyaratan pembuatan dokumen kependudukan dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan melalui informasi layar sentuh	Inovasi layar sentuh telah digunakan mulai tahun 2017 sampai dengan sekarang telah menampilkan informasi tentang persyaratan dan alur pembuatan dokumen kependudukan meliputi perubahan kartu keluarga, cetak ktp, prosedur surat pindah atau pindah datang, akta kelahiran, akta kematian dan akta akta lainnya. Layar sentuh tersebut dapat digunakan secara langsung oleh masyarakat dengan cara memilih menu menu yang telah disediakan. Menu menu yang ada adalah perundang-undangan, persyaratan dan alur pembuatan dokumen kependudukan, foto dan video kegiatan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan



NO	JENIS INOVASI	TUJUAN INOVASI	KETERANGAN
	2	3	4
9.	Inovasi SIMAKDES yaitu Sistem Informasi Manajemen administrasi Kependudukan Tingkat desa/kelurahan	Inovasi SIMAKDES (Sistem Informasi Manajemen administrasi Kependudukan Tingkat desa/kelurahan) bertujuan untuk : 1. Membangun sistem administrasi kependudukan tingkat desa dengan berbasis teknologi informasi untuk tertib administrasi kependudukan. 2. Menyediakan sistem aplikasi yang dapat digunakan untuk mempercepat proses pelayanan administrasi kependudukan di tingkat desa. 3. Mempermudah pelayanan administrasi kependudukan di tingkat desa.	Simakdes di gunakan untuk melayani administrasi kependudukan berbasis di desa meliputi pembuatan surat keterangan, surat pernyataan, administrasi pendaftaran penduduk, administrasi pencatatan sipil, laporan monografi desa, dan laporan kependudukan lainnya. Yang terdiri dari modul-modul sebagai berikut : Setting, Administrasi, Laporan & Monografi Desa/Kelurahan, Manajemen Data
10.	Inovasi Simbah Super yaitu Sistem Informasi Perubahan Status Pekerjaan bagi PNS, TNI dan POLRI yang Purna Tugas	Inovasi Simbah Super (Sistem Informasi Perubahan Status Pekerjaan bagi PNS, TNI dan POLRI yang Purna Tugas) bertujuan untuk meningkatkan validitas data kependudukan status pekerjaan bagi pensiunan PNS, TNI dan POLRI penduduk Kabupaten Grobogan. Mempercepat proses pelayanan	Dalam pelaksanaan inovasi ini Dispendukcapil bekerja sama dengan BKPPD Kabupaten Grobogan, KODIM 0717 Purwodadi dan POLRES Grobogan untuk penerbitan KK dan KTP status pekerjaan Pensiunan yang diserahkan bersama dengan SK Pensiun bagi PNS, anggota TNI dan anggota POLRI yang memasuki masa pensiun. Mekanismenya petugas di BKPPD, KODIM 0717 dan



NO	JENIS INOVASI	TUJUAN INOVASI	KETERANGAN
	2	3	4
		dokumen kependudukan dan meningkatkan pemahaman pentingnya pemutakhiran data khususnya pekerjaan.	POLRES mengirimkan data PNS, anggota TNI dan POLRI yang akan memasuki masa pensiun bulan berikutnya. Petugas Dispendukcapil merubah status pekerjaan pensiunan, mencetak KK dan KTP serta mendistribusikan kepada Instansi terkait. Petugas BKPPD, KODIM dan POLRES menyerahkan KK dan KTP status pekerjaan pensiunan bersamaan dengan penyerahan SK pensiun dan menarik KK dan KTP lama. Petugas dispendukcapil mengambil KK dan KTP lama untuk diarsipkan.
11.	Inovasi Smpel yaitu Sistem Informasi Pelayanan	Inovasi Smpel bertujuan untuk : menyederhanakan proses pendaftaran, memberikan kejelasan tentang informasi permohonan dokumen kependudukan, memberi kepastian waktu layanan dan memberikan kemudahan akses informasi permohonan.	Mekanisme dari SIMPEL ini yaitu Pemohon datang mengambil antrian sesuai dengan jenis permohonan yang akan diajukan. Setelah mendapatkan panggilan sesuai dengan nomor antriannya, pemohon menyerahkan berkas permohonan. Petugas cukup memasukkan NIK pemohon, NIK yang di mohonkan dan jenis permohonan yang diajukan. Petugas akan mencetak tanda terima pendaftaran rangkap 2, yang satu untuk di tempel di berkas permohonan dan yang satu di serahkan kepada pemohon. Tanda terima pendaftaran memuat nomor



NO	JENIS INOVASI	TUJUAN INOVASI	KETERANGAN
2		3	4
			<p>register (berupa nomor seri dan barchode), identitas pemohon, identitas yang dimohonkan dan jenis permohonannya. Tanda terima pendaftaran digunakan untuk mengambil dokumen kependudukan yang sudah jadi di loket pengambilan.</p> <p>Setiap pendaftaran dokumen kependudukan akan muncul di layar monitor pelayanan didepan loket pengambilan. Layar monitor ini memuat nomor register, NIK yang dimohonkan dan jenis permohonan, juga memuat waktu penyelesaian serta progress permohonannya apakah dokumen tersebut masih proses, sudah jadi atau ditunda karena ada masalah kependudukan (pending).</p> <p>Apabila dalam keterangan dimonitor bahwa dokumen sudah jadi, pemohon dapat langsung mengambil di loket pengambilan atau menunggu panggilan dari sistem bahwa permohonannya sudah jadi. Apabila permohonan tersebut "pending" maka petugas akan memanggil pemohon untuk menjelaskan permasalahan dan solusi yang harus dilakukan untuk memperbaiki data tersebut.</p>



NO	JENIS INOVASI	TUJUAN INOVASI	KETERANGAN
	2	3	4
			Monitoring permohonan juga dapat diakses melalui website Dispendukcapil dengan alamat <i>dispendukcapil.grobogan.go.id</i> . Langkah langkahnya adalah masuk ke website Dispendukcapil dan klik “masuk halaman utama” kemudian klik sub menu monitor pelayanan, maka akan di tampilkan monitor pelayanan pada hari tersebut.
12.	Inovasi E-Simpel atau Simpel Tenan yaitu Sistem Informasi Pelayanan Secara Online. Aplikasi E-Simpel berbasis website dan aplikasi Simpel Tenan berbasis android.	Inovasi e-Simpel atau Simpel Tenan (Sistem Informasi Pelayanan Secara Online) bertujuan untuk : <ol style="list-style-type: none">1. Kemudahan dalam melakukan pendaftaran dokumen kependudukan dimanapun dan kapanpun.2. Memberikan informasi progres pendaftaran melalui website dan aplikasi SIMPEL TENAN.3. Memberikan informasi progres pendaftaran melalui WA ketika permohonannya sudah lengkap, atau sudah jadi.4. Dapat mengurangi penumpukan pemohon didalam ruangan pelayanan.	Aplikasi pendaftar online E-SIMPEL dapat di akses melalui alamat website <i>e-simpel.dispendukcapil.grobogan.go.id</i> sedangkan aplikasi SIMPEL TENAN dapat di download di playstore.



NO	JENIS INOVASI	TUJUAN INOVASI	KETERANGAN
	2	3	4
13.	Inovasi Pos Pakdhe yaitu Pos pelayanan administrasi kependudukan di 7 Desa pelayanan	Inovasi Pos Pakdhe (Pos pelayanan administrasi kependudukan di 7 Desa pelayanan) bertujuan untuk melayani administrasi kependudukan berupa Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran	<p>Mekanisme dari Inovasi Pos Pakdhe adalah sebagai berikut pemohon membawa persyaratan pembuatan Kartu Keluarga atau Akta kelahiran di desa masing masing sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan. Petugas desa input data permohonan, jenis pelayanan yang dikehendaki, nomor WA, nama email dan uraian singkat permohonan yang diajukan. Upload dokumen pendukung sesuai dengan persyaratan yang ditentukan melalui aplikasi e simpel yang yang terkoneksi dengan data pelayanan di dinas.</p> <p>Petugas dinas memverifikasi permohonan tersebut dan memberi tanda bahwa dokumen tersebut lengkap, kurang lengkap, di cetak dan dapat diambil. Pemohon akan mendapatkan notifikasi progres permohonan dokumen kependudukannya.</p> <p>Setelah dokumen selesai diproses, petugas dinas akan mengirimkan kk atau akta kelahiran dalam bentuk file PDF ke petugas desa yang mendaftarkan permohonan tersebut.</p> <p>Petugas desa mengganti notifikasi progress permohonannya menjadi siap</p>



NO	JENIS INOVASI	TUJUAN INOVASI	KETERANGAN
	2	3	4
			<p>diambil dan secara otomatis akan mengirimkan notifikasi kepada penduduk untuk mengambil dokumen tersebut di Balai desa.</p> <p>Petugas dispendukcapil secara berkala akan mengambil dokumen permohonan KK maupun akta kelahiran yang ada di Desa dan meminta tanda tangan register akta kelahiran kepada petugas desa sebagai pelapor.</p>



4.2 Data Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar 45 orang terdiri dari:

1. Pegawai Golongan I sebesar 1 orang
2. Pegawai Golongan II sebesar 10 orang
3. Pegawai Golongan III sebesar 25 orang
4. Pegawai Golongan IV sebesar 9 orang

Rincian PNS sampai dengan 31 Desember 2020 berdasarkan Golongan/Ruang, Eselon, Tenaga Fungsional, dan Staf di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan dapat dilihat dalam tabel berikut:

TABEL DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2020

Golongan	ESELON					Fungsional	Staf	Total
	I	II	III	IV	V			
IV/e	-	-	-	-	-	-	-	-
IV/d	-	-	-	-	-	-	-	-
IV/c	-	-	-	-	-	-	-	-
IV/b	-	1	-	-	-	-	-	1
IV/a	-	-	5	3	-	-	-	8
Jumlah Gol. IV	-	1	5	3	-	-	-	9
III/d	-	-	-	4	-	-	-	4
III/c	-	-	-	7	-	-	-	7
III/b	-	-	-	1	-	-	5	6
III/a	-	-	-	-	-	-	8	8
Jumlah Gol. III	-	-	-	12	-	-	13	25
II/d	-	-	-	-	-	-	5	5
II/c	-	-	-	-	-	-	4	4
II/b	-	-	-	-	-	-	1	1
II/a	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Gol. II	-	-	-	-	-	-	10	10
I/d	-	-	-	-	-	-	-	-
I/c	-	-	-	-	-	-	1	1
I/b	-	-	-	-	-	-	-	-
I/a	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Gol. I	-	-	-	-	-	-	1	1
Jumlah PNS	-	1	5	15	-	-	25	45

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Grobogan



BAB V

PENUTUP

Dari uraian sebagaimana tersebut pada Bab I, II, III, dan IV, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Laporan Keuangan ini merupakan Laporan Keuangan audited yang disusun sesuai dengan penerapan basis akrual sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
2. Ikhtisar pencapaian pendapatan sebesar Rp0,00 lebih rendah Rp0,00 atau 0,00 persen jika dibandingkan dengan anggarannya yaitu sebesar Rp0,00.
3. Ikhtisar pencapaian belanja dan transfer sebesar Rp10.119.883.831,00 lebih rendah (Rp573.071.153,00) atau 5,36 persen jika dibandingkan dengan anggarannya yaitu sebesar Rp10.692.954.984,00.
4. Berdasarkan realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp0,00 dan realisasi Belanja Daerah sebesar Rp10.119.883.831,00; maka terjadi Defisit Anggaran pada TA 2020 sebesar (Rp10.119.883.831,00). Sementara itu, realisasi Pembiayaan (Netto) pada TA 2020 adalah sebesar (Rp0,00) yang berasal dari Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp0,00 dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp0,00. Terjadinya Surplus Anggaran dan adanya realisasi Pembiayaan Netto mengakibatkan Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SIkPA) TA 2020 sebesar (Rp10.119.883.831,00).
5. Pada Laporan Operasional per 31 Desember 2020, jumlah Pendapatan-LO sebesar Rp0,00 dan jumlah Beban sebesar Rp10.540.394.045,26.
6. Pada Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2020, Ekuitas Awal sebesar Rp9.629.952.519,93 dan Ekuitas Akhir sebesar Rp9.209.442.305,67.



7. Pada Laporan Neraca per 31 Desember 2020, jumlah Aset sebesar Rp 9.215.666.431,67 dibandingkan dengan Neraca per 31 Desember 2019 sebesar Rp9.638.542.932,93 atau mengalami penurunan sebesar 4,38 persen. Jumlah Aset tersebut terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp 2.712.824.687,40 Investasi Jangka Panjang sebesar Rp0,00 Aset Tetap sebesar Rp6.465.057.775,53 Dana Cadangan sebesar Rp0,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp37.783.968,94 sedangkan untuk Jumlah Kewajiban dan Ekuitas sebesar Rp9.215.666.431,67 terdiri dari Kewajiban sebesar Rp6.224.126,00 Ekuitas sebesar Rp9.209.442.305,67.

Dari kesimpulan sebagaimana tersebut di atas, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan sampai dengan akhir tahun 2020 ini tidak luput dari kekurangan. Hal ini tentu saja akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan agar kekurangan di dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat diminimalisir pada tahun-tahun mendatang.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan mampu menjadi pemacu peningkatan kualitas dan kreatifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Grobogan untuk tahun berikutnya.

Purwodadi, Pebruari 2021

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KAB.GROBOGAN

ACHMAD BASUKI MULYONO, S.Sos, MM

NIP. 19650530 198601 1 001